

**LAPORAN TAHUNAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**STUDI EMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK  
PERIZINAN INVESTASI DI DIY**

**Tahun Ke 1 dari Rencana 3 Tahun**

**KETUA:**

**Eny Kusdarini, SH. M.Hum NIDN: 0004036006**

**ANGGOTA:**

**Setiati Widiastuti, SH. M.Hum NIDN: 00028036005  
Candra Dewi Puspitasari, SH. LL.M NIDN: 0002078006**

**Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan  
Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program  
Penelitian Hibang Bersaing Tahun Anggaran 2013  
Nomor: 447a/HB-Multitahun/UN34.21/2013 Mei 2013**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOVEMBER 2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Studi Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perijinan Investasi di Provinsi DIY

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : ENY KUSDARINI M.Hum.

NIDN : 0004036006

Jabatan Fungsional :

Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Nomor HP : 08122726326

Surel (e-mail) : eny.kusdarini@yahoo.com

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 50.000.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp.



Mengetahui,  
Dekan FIS UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag  
NIP. 19620321 198903 1 003

Yogyakarta, 27-11-2013

Ketua Peneliti,

(ENY KUSDARINI M.Hum.)  
NIP/NIK196003041986012001

Menyetujui,  
Ketua LPPM UNY,



Prof. Dr. Anik Ghufroon  
NIP. 19621111 198803 1 001

## **Prakata**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul “Studi Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi di DIY”. Penelitian ini dibiayai oleh DIPA UNY dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibang Bersaing Multitahun dengan Nomor: 447a/HB-Multitahun/UN34.21/2013 Mei 2013.

Hasil penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan publik bidang perizinan investasi di DIY dengan mengambil contoh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang pada tahun 2013 mendapatkan predikat terbaik 1 (satu) dan 2 (2) di DIY. Penelitian terutama difokuskan pada implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam produk-produk hukum daerah dan juga implementasi pada pelaksanaan layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana dan tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Anik Ghufro, selaku Ketua LPPM UNY yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian;
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag, selaku Dekan FIS UNY yang telah memfasilitasi dan memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;
3. Pejabat-pejabat di lingkungan BKPM DIY dan Gerai Investasi DIY yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian;
4. Pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, khususnya Ibu Isni Dianti, M.Ap selaku Kabag Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Bapak Darsono M Si, selaku Kasi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian;

5. Pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman terutama Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data terkait dengan pelaksanaan perizinan di Kab Sleman;
6. Teman-teman kolega di jurusan PKn dan Hukum dan nara sumber FGD yang telah memberikan masukan-masukan untuk perbaikan analisis hasil penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian;
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, walaupun sudah banyak masukan-masukan dari berbagai pihak pada saat seminar proposal penelitian, seminar instrumen penelitian, pada kegiatan FGD, dan Seminar Hasil Penelitian. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari para pembaca yang budiman. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Laporan Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB 4. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....</b>	<b>80</b>
<b>BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Personalia Penelitian dan Kualifikasi

Lampiran 3. Abstrak artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia

Lampiran 4. Abstrak artikel ilmiah dalam bahasa Inggris

Lampiran 5. Naskah Lengkap artikel dalam Bahasa Inggris

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1. Kegiatan Advice Planning.....	46
Gambar 2. Kegiatan Layanan Advice Planning.....	46
Gambar 3. Locket-Locket Pengurusan Perizinan .....	47
Gambar 5. Maklumat tentang Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan.....	48
Gambar 6. Penggalan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan....	48
Gambar 6. Layar Sentuh Antrian.....	49
Gambar 8. Pintu Masuk Ruang Pelayanan Perizinan Kota Yogyakarta.....	50
Gambar 9. Arah Kanan Pintu Masuk Ruang Pelayanan Perizinan.....	50
Gambar 10. Pintu Masuk Kantor Pelayanan Perizinan Kab Sleman.....	52
Gambar 11. Nomor Locket-loket Antrian.....	53
Gambar 12. Gambar Layar Sentuh Antrian .....	53
Gambar 13. Locket Pelayanan Perizinan Kantor Perizinan Sleman.....	54
Gambar 14 Maklumat Mekanisme Layanan Perizinan.....	55
Gambar 15 Maklumat Mekanisme Pelayanan Izin Gangguan.....	55

## Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan pelaksanaan asas-asas umum yang baik sebagaimana tertuang dalam UU Pelayanan Publik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) mengidentifikasi implemenyasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY; 3) mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas- asas umum yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di Propinsi DIY.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio-legal riset* dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan asas-asas umum yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan *Focus Group Discussion*. Subjek ini adalah pejabat/staff Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat/staff Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, masyarakat yang pernah dan sedang memperoleh layanan publik perijinan investasi di DIY serta narasumber yang ahli di bidang kajian asas-asas umum pemerintahan yang baik.. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan layanan perizinan investasi. Di Kota Yogyakarta kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota sudah memperlihatkan secara eksplisit maupun secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Sleman kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati belum banyak yang memperlihatkan secara eksplisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian secara implisit sudah terlihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang masalah**

Pembangunan yang tengah dilaksanakan di Indonesia dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan profesional. Oleh karena itu alat administrasi negara termasuk aparat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik, profesional, dan akuntabel. Apalagi pada era reformasi di Indonesia sekarang ini, di mana proses demokratisasi sudah membawa keberanian warga untuk menuntut alat administrasi negara melayaninya sesuai dengan koridor hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik di Indonesia, seperti yang dilaporkan dalam Seminar Hasil Kajian Model Kelembagaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Bidang Air Bersih, Kebersihan dan Ruang Publik) yang diadakan Staff Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Bappenas pada tanggal 28 Januari 2008, bahwa permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi dalam pelayanan publik di Indonesia). Lebih dari itu, pelayanan publik cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsifitas, dan tidak representatif. Banyak contoh yang ditemukan bahwa pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan jasa yang dikelola pemerintah tidak memuaskan masyarakat, bahkan kalah bersaing dengan pelayanan pihak swasta. Gejala ini telah dikemukakan Norman Flyn (1990: 38) bahwa pelayanan publik yang dikelola pemerintah secara hierarkis cenderung bercirikan *over bureaucratic, bloated, wasteful*, dan *under performing*. (Anonim. Hasil Penelitian Pelayanan Publik Di Era Desentralisasi, Bappenas. Diakses dari [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), tanggal akses 4 Januari 2012).

Pada hal negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, termasuk dalam bidang pendidikan dasar dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membangun kepercayaan

masyarakat atas pelayanan publik maka harus dilakukan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk dengan mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah dikembangkan menjadi bagian dari hukum tertulis di Indonesia, di antaranya di tuangkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN mengenai asas umum penyelenggaraan Negara, ketentuan Pasal 20 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam ketentuan Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Diharapkan setelah dipaparkan hasil penelitian dan kajian serta teridentifikasi praktek-praktek tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak dalam kebijakan pelayanan administrasi penanaman modal di Daerah Kabupaten/Kota DIY yang telah melaksanakan layanan perizinan dengan baik, dapat dijadikan rujukan bagi layanan publik pada Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia lainnya dalam melakukan pelayanan publik pada warganya terutama para investor yang kan menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dalam jangka panjang dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*) dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi penanaman modal di Indonesia.

Penelitian ini penting dan dipandang urgen, mengingat bahwa kebijakan layanan administrasi penanaman modal merupakan layanan publik yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana layanan publik yang berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk utamanya para penanam modal untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 3 UU Pelayanan Publik, yakni terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Di samping itu pelaksana layanan publik pada layanan administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi harus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakannya seiring dengan harapan dan tuntutan warga masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik, serta untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk termasuk mereka yang akan mencari layanan administrasi penanaman modal bidang perizinan investasi selaku pengguna layanan dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia.

Pada era reformasi sekarang ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan administrasi penanaman modal. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Di samping itu selama ini banyak anggapan dari masyarakat bahwa pelayanan publik yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia masih buruk, seperti dilansir oleh media Pontianak Post mengenai Pelayanan Publik di Indonesia masih buruk dalam sosialisasi Ombudsman di Kalimantan Barat tanggal 20 April 2011. Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 April 2011 juga melansir bahwa buruknya pelayanan publik bergantung kepada beberapa unsur seperti pemahaman masyarakat atas jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan, biaya dan hasil pelayanannya (Anonim. Diakses dari [www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com), tanggal akses 22 April 2011). Hasil pantauan KPK tentang kota dan kabupaten yang memiliki pelayanan publik terbaik hingga terburuk diantaranya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pungutan liar diluar retribusi di instansi. Di samping itu juga temuan-temuan Ombudsman RI dari aduan-aduan masyarakat mengenai terjadinya mal administrasi di beberapa instansi (Anonim. Diakses dari [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id), tanggal akses 22 April 2011).

Hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2010 lalu terhadap pelayanan publik di Indonesia menyebutkan bahwa indeks prestasi pelayanan publik di Indonesia adalah 5,42 dari skala 1-10. Artinya, masyarakat menilai pelayanan publik di Indonesia tidak memuaskan, cenderung korup, dan merugikan (Anonim. 2011. *Ombudsman dan Reformasi Birokrasi*. Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)., tanggal akses 22 April 2011).

Di tengah posisinya yang cukup strategis, birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari berbagai kritik yang hadir yaitu: buruknya pelayanan publik; besarnya angka kebocoran anggaran negara; rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS; sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi; masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainnya; birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi; tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa *legal cost* maupun *illegal cost*, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan (Anonim. Diakses dari [www.swamandiri.wordpress.com](http://www.swamandiri.wordpress.com), tanggal akses 23 April 2011).

Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum baik, dan aparat pemerintah pelayanan publik belum mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang awalnya merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia, akan tetapi pada saat ini sudah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Namun demikian, tidak semua aparat pelayanan publik, terutama di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berperilaku tanpa mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada beberapa daerah yang aparatnya telah melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga bisa dijadikan rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan pelayanan publik di wilayahnya dengan mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan pemberitaan harian Kompas cetak yang ditulis Ratna Sri Widyastuti, dinyatakan bahwa setelah 14 tahun menanti Indonesia mendapatkan status layak investasi dari lembaga pemeringkat *Fitch Ratings* dan *Moody's Investor Service*.

Menurut berita tersebut dinyatakan bahwa potensi peningkatan investasi domestik kian besar karena iklim usaha yang makin kondusif bagi investor di dalam negeri indikator ini bisa dilihat dari laporan Bank Dunia dan Korporasi Keuangan Internasional mengenai kemudahan melakukan usaha di sejumlah negara yang menyebutkan langkah maju Indonesia. Negeri ini berhasil menekan waktu pengurusan waktu administrasi untuk investasi. Dua belas prosedur tahun 2006, sudah dipangkas hingga tinggal 9 prosedur. Dari laporan kedua lembaga internasional tersebut Kota Yogyakarta disebutkan menjadi tempat paling mudah untuk memulai bisnis di antara 20 kota besar di Indonesia. Membuka usaha di Yogyakarta hanya memerlukan delapan prosedur dengan waktu 29 hari. Biaya yang dibutuhkan sekitar 18,5 persen dari pendapatan warga. Waktu dan biaya untuk pengurusan bisnis di Yogyakarta ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Indonesia, yaitu 9 prosedur selama 33 hari dengan biaya 22 persen dari pendapatan warga. Pengalaman Kota Yogyakarta ini bisa menjadi model bagi daerah lain. Tidak hanya di Pulau Jawa atau bagian barat Indonesia, tetapi juga di wilayah bagian timur Indonesia (Harian Kompas 25 Februari 2012 hal: 17).

Oleh karena itu, perlu diteliti Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik dengan mengambil contoh kasus tentang tata kelola pemerintahan pada bidang perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi DIY, terutama pada wilayah kabupaten/kota yang mendapat peringkat dua (2) terbaik di DIY. Untuk itu penelitian tahun pertama ini, studi difokuskan pada daerah Kabupaten/Kota di DIY yang mendapatkan peringkat 1 dan 2 dalam layanan publik perizinan investasi. Penelitian tersebut sepengetahuan peneliti belum pernah dikaji oleh peneliti lain, sehingga diharapkan juga nantinya bisa mengisi kekosongan studi dan kajian dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di DIY.

Pada penelitian tahun pertama ini, studi difokuskan pada daerah Kabupaten/Kota di DIY yang mendapatkan peringkat 1 dan 2 dalam layanan publik perizinan investasi. Penelitian tersebut sepengetahuan peneliti belum pernah dikaji oleh peneliti lain, sehingga diharapkan juga nantinya bisa mengisi kekosongan studi dan kajian dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di DIY. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tertuang

dalam Pasal 4 UUNo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terutama dalam layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai wilayah yang memperoleh predikat terbaik satu (1) dan predikat terbaik dua (2) berdasarkan penilaian dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan urgensi penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pokok permasalahan sebagai berikut:

“Implementasi Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi di DIY terutama pada Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat satu (1) dan dua (2) di DIY”.

### **2. Rumusan Masalah**

Dari pokok permasalahan tersebut di muka, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di DIY pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat peringkat terbaik nomor 1 dan 2 di DIY?
- b. Bagaimanakah Implementasi Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat peringkat terbaik nomor 1 dan 2 di DIY?
- c. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di DIY?

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Perizinan Investasi di Indonesia

Hasil penelitian dan kajian yang dibuat oleh Moh. Jasin, dkk, tentang Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Non Perijinan Sebagai Wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan layanan publik dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung efektifnya pelayanan publik menunjukkan bahwa setiap daerah menerapkan sistem dan bentuk layanan yang berbeda-beda. Namun secara bertahap daerah-daerah yang dikaji berkemauan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil kajian dari beberapa aspek menunjukkan ada beberapa profil layanan perizinan dan non perizinan dari beberapa daerah kajian, peraturan-peraturan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan standar minimal pelayanan perizinan dan non perizinan. Mengenai profil pelayanan perizinan teridentifikasi sistem pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah yang menjadi kajian. Sistem tersebut berbentuk Pelayanan Unit Instansi Teknis, Pelayanan Satu Atap, Pelayanan Satu Pintu, dan Pelayanan Satu Atap dan Satu Pintu (*One Stop Service* = OSS) yang masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan dari sisi proses, prosedur, transparansi, jangka waktu pengurusan, biaya-biaya, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Mengenai bentuk organisasi pelayanan pelayanan terpadu dari hasil survey ditemukan beberapa bentuk mulai dari yang sederhana hingga bentuk yang paling tinggi, yaitu : Pos, Unit, Kantor, dan Dinas/Badan. Dari hasil temuan dilaporkan bahwa bentuk organisasi yang paling ideal adalah Dinas/Badan dikarenakan wewenang penandatangan sepenuhnya sudah dipegang oleh Kepala Dinas/Badan, serta umumnya Dinas/Badan sudah menerapkan system *One Stop Service*, dinyatakan ideal juga karena sudah didukung oleh anggaran yang cukup dan independensi dalam mengembangkan sistem layanan yang lebih baik (Moh Jasin, dkk. 2006. *Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Non Perijinan Sebagai Wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), tanggal akses 19 April 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Jasin dkk, tersebut belum mengacu secara komprehensif pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik walaupun sudah mengkaitkan dengan

beberapa asas pemerintahan yang baik. Hal ini bisa dipahami mengingat penelitian dilakukan pada tahun 2006, sedangkan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik baru dikeluarkan pada tahun 2009.

Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikeluarkan pada tahun 2009 tersebut, dinyatakan bahwa para penyelenggara pelayanan publik, di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus mengindahkan asas-asas dalam pelayanan publik, yakni asas : **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaam perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.** Oleh karena itu, dalam melaksanakan pelayanan publik aparat pemerintah sebagai pelaksana dari pelayanan publik harus mengindahkan asas-asas umum pemerintahan sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 4 UUNo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selain harus mengindahkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang di atur dalam Pasal 20 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni asas: **kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.**

Sebagaimana dinyatakan oleh Aida Ratnawati & Niken Arianti dalam penelitiannya yang berjudul “Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” bahwa keberhasilan praktek-praktek *good governance* tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Apabila suatu daerah secara konsisten menerapkan praktik-praktik *good governance* secara terus menerus, maka hasil dan dampaknya akan diperoleh. Bahkan penerapan praktek-praktek *good governce* pada jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Menurutnya ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan praktik *good governance* di suatu daerah, yaitu : peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelola sumberdaya; peningkatan pelayanan publik; peningkatan *Human Development Index* (HDI); peningkatan partisipasi masyarakat; peningkatan transparansi; peningkatan akuntabilitas; penurunan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN; peningkatan Angka Kesempatan Kerja; dan



penurunan Angka Kemiskinan (Aida Ratnawati & Niken Arianti. 2006. *Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), tanggal akses 23 April 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eny Kusdarini dkk tentang "Identifikasi Gugatan Pelanggaran Terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik melalui PTUN Yogyakarta" pada tahun 2011, diketahui bahwa gugatan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dari tahun 2005 sampai dengan 2010 pada kasus pelaksanaan pelayanan publik menduduki urutan ke tiga setelah gugatan terhadap sengketa kepegawaian, dan sengketa administrasi pertanahan termasuk tanah-tanah Sultan Ground di DIY. Untuk itu perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di DIY, yang akan melihat bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Pasal 4 UUNo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam kebijakan pelayanan publik dan pelaksanaannya di Indonesia khususnya pelayanan publik di bidang administrasi penanaman modal dalam perizinan investasi di DIY.

## **B. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Di Indonesia**

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada era reformasi sekarang ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Muin Fahmal (2006: 9-11) menyatakan bahwa pada awalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan sebuah asas hukum tidak tertulis yang muncul di Parlemen Belanda pada bulan April 1950, yang dikemukakan oleh Komisi *De' Monchy* selaku anggota Parlemen Belanda. Menurut *De' Monchy*, dipandang perlu segera diadakan perlindungan dari para warga (burger) terhadap tindakan-tindakan administrasi negara. Meskipun tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dipaparkan oleh *Monchy* bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang bersih, maka para penyelenggara administrasi tidak cukup hanya berpegang pada aturan normatif undang-undang. Mereka juga harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara. Pemikiran dilatarbelakangi bahwa dalam berbagai doktrin tentang kehidupan ketatanegaraan dimungkinkan adanya tindakan yang cepat, tepat dan berfaedah, namun harus tetap dalam bingkai yuridis.

Pelaksanaan asas-asas umum yang baik di Indonesia juga dilatarbelakangi bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini terlihat dari pernyataan alenia ke empat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, keadilan social. Demikian juga sila ke lima Pancasila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu keikutsertaan negara yang dalam hal ini diwakili oleh alat administrasi negara, baik yang berada pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota menemukan landasan yuridis dan filosofisnya, sehingga menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Dalam bertindak melaksanakan tugas-tugasnya peluang peluang kemungkinan timbulnya konflik atau benturan kepentingan antara alat administrasi negara dengan warga negara akan semakin sulit dihindarkan (Marbun, 2003 : 272). Oleh karena itu, supaya tindakan alat administrasi negara tidak merugikan warga negara yang dilayaninya, harus mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melakukan pelayanan publik.

Pasal 1 ayat 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik harus mengindahkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk: menyusun dan menetapkan standar pelayanan; menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan; menempatkan pelaksana yang kompeten; menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; berpartisipasi aktif dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya; bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik atau yang sering disebut dengan pelayanan umum didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah baik itu Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan (Anonim. Diakses dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), tanggal akses 23 April 2011).

Para penyelenggara pelayanan publik harus mengindahkan asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 4 UU Pelayanan Publik. Ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan asas-asas umum yang baik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia selama ini mengacu pada kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sampai saat ini Indeks Kepuasan Masyarakat ini masih dipakai oleh instansi pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan di Kabupaten/Kota.

Bintan Saragih, mengutip pernyataan Robert Hass (Menteri Ekonomi, Koperasi dan Pembangunan Jerman) dan Bank Pembangunan Asia dalam makalahnya yang berjudul "Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Reformasi Birokrasi" yang dimuat dalam Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 Oktober 2008, menyatakan bahwa beberapa butir konsep *good governance* untuk dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga adalah: melaksanakan hak asasi manusia; masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; melaksanakan hukum untuk melindungi masyarakat; mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat; orientasi politik pemerintah menuju pembangunan; akuntabilitas pemerintah baik manajemen maupun keuangan; dan transparansi terhadap berbagai informasi, termasuk proses justifikasi pembangunan suatu program proyek. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang jelek dapat diidentifikasi dalam indikator-indikator sebagai berikut: hal-hal yang bersifat publik dan pribadi, baik dalam tata laksana maupun kepemilikannya tidak jelas perbedaannya; terlalu banyak regulasi pada birokrasi sehingga menghalangi berfungsinya mekanisme pasar; berbagai peraturan yang

berlaku tidak mendukung terciptanya iklim kondusif dalam mendorong pembangunan; pengambilan keputusan tidak transparan dan kurangnya partisipasi masyarakat; prioritas tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan; dan perhatian pada hak asasi masih kurang.

### C. Kebijakan Pelayanan Perizinan Investasi Di Indonesia

Kebijakan pelayanan perizinan investasi di Indonesia mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan berbagai peraturan perundangan lain terkait yang terkait dengan kegiatan investasi (penanaman modal) di Indonesia.

Dimaksudkan dengan penanaman modal di sini adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: **kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**

Mengenai kebijakan dasar dalam penanaman modal, Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar untuk:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Untuk itu dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal maka pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Berkaitan dengan kebijakan perizinan investasi di Indonesia Pasal 25 ayat (4) Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Sedangkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) undang-undang tersebut menyatakan bahwa izin-izin bagi para investor diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan satu pintu ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan perizinan ini dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di propinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal, ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Presiden.

Pelayanan Perizinan Satu Pintu di bidang penanaman modal di atur dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Perizinan yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal (investasi) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal, didasarkan pada asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, dan efisiensi berkeadilan. Penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk membangun penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan. Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan investasi. Adapun tolok ukur penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009, adalah dilihat dari pelaksanaan penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal yang harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal ini harus didukung dengan ketersediaan:

1. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
2. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
3. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh investor;
4. layanan pengaduan (*help desk*) penanam modal, dan
5. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 tersebut juga diatur tentang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu:

- a. Penyelenggaraan investasi yang ruang lingkupnya lintas propinsi;
- b. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang meliputi:

- 1) Investasi terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbaharukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- 2) Investasi pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- 3) Investasi yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsi;
- 4) Investasi yang terkait dengan pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- 5) Investasi asing dan investasi yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah negar lain; dan
- 6) Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.

Di dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 diatur tentang penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah kabupaten/Kota di Bidang Penanaman Modal, di mana dalam penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal PDKPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal dipemerintah Kabupaten/kota. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fungsi PTSP di bidang penanaman modal dan fungsi lain, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan non perizinan
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal
- c. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal



- d. Memberikan insentif daerah dan atau kemudahan penanaman modal
- e. Membuat peta penanaman modal
- f. Mengembangkan peluang dan potensi penanam modal
- g. Mempromosikan penanaman modal
- h. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal.
- i. Menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal.

Adapun jenis-jenis pelayanan penanaman modal yang ruang lingkup kewenangannya ada pada PDKM yang diselenggarakan oleh PTSP, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal adalah meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Jenis pelayanan perizinan penanaman modal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) tersebut meliputi:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal (Persetujuan awal);
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal, wajib bagi yang memperoleh fasilitas fiskal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha, izin usaha perluasan, izin usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger) dan Izin usaha perubahan.
- f. Izin Lokasi;
- g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Izin Gangguan (UUG/HO);
- j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. Hak atas tanah;
- m. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal.

Adapun jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan antara lain;

- a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;

- c. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan;
- d. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) & Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T);
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Rekomendasi Fisa untuk Bekerja (TA.01);
- g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- h. Insentif daerah;
- i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Sementara itu untuk menilai kinerja aparat pemerintah dalam melakukan pelayanan perizinan investasi di Indonesia dipergunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Di dalam keputusan tersebut ditetapkan 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara atau birokrat, yaitu :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Indikator-indikator kinerja organisasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tersebut sampai saat ini masih dipakai untuk menilai kinerja aparat pelayan publik oleh masyarakat pengguna layanan termasuk layanan perizinan investasi. Dasar dari pemberlakuan Indikator-indikator kinerja organisasi dalam pelayanan perizinan investasi tersebut mengacu pada lampiran V Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Lampiran V Perka BKPM tersebut menjabarkan tentang Pedoman Pelayanan Prima dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PTSP Di Bidang Penanaman Modal. Di dalam Lampiran Perka BKPM tersebut ditentukan mengenai indikator pelayanan prima terkait dengan waktu pelayanan, standar etika penampilan petugas pelayanan, etika dalam pelayanan dan unsur-unsur Indeks Kepuasan Masyarakat yang dibuat mengacu pada Indikator-indikator kinerja organisasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

25/KEP/M.PAN/2/2004. Pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sampai saat ini setiap pengguna layanan perizinan di minta untuk mengisi kuesioner yang berisi penilaian terhadap kinerja layanan aparat perizinan dan keluhan-keluhan terhadap layanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta setiap bulan IKM tersebut dievaluasi untuk ditindak lanjuti.

## BAB 3

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang implementasi pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dengan mengkaji tata kelola pemerintahan pada pelayanan publik di bidang perizinan investasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan layanan perizinan investasi dengan baik di Propinsi DIY untuk dijadikan contoh bagi pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di bidang perizinan investasi di Daerah Kabupaten/Kota lainnya agar tercipta *good and clean government* di Indonesia, terutama **dalam pelayanan bidang perizinan investasi**. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pelayanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan administrasi dalam penanaman modal dan di Indonesia pada saat ini tengah dicanangkan industri kreatif dan merupakan daerah tujuan investasi dari para penanam modal. Untuk itu diperlukan pelayanan yang baik dengan mengindahkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam bidang administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik, di Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tujuan investasi dari para investor sebagai bagian dari institusi penyelenggara negara yang ditugasi untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, disamping penyelenggara pelayanan publik lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

#### B. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat praktis untuk beberapa pihak, yaitu:

- a. **Bagi Pemerintah DIY**, dapat memberikan gambaran tentang kajian implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas layanan publik yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam kebijakan perizinan investasi dan pelaksanaan perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

khususnya dalam hal penerapan kebijakan perizinan satu pintu dalam pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dan pelayanan satu atap dalam perizinan investasi di Kabupaten Sleman beserta kendala yang dihadapi untuk selanjutnya diharapkan Pemerintah DIY secara koordinasi bisa membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh ke dua daerah yang menjadi bagian dari wilayahnya tersebut.

- b. **Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta**, diharapkan hasil kajian ini bisa memberikan gambaran tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada beberapa kebijakan yang terkait dengan perizinan investasi yang berupa produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang berdasarkan temuan terhadap beberapa contoh kebijakan yang dikaji, belum semuanya secara eksplisit mengimplemetasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk selanjutnya diharapkan dalam pembuatan kebijakan terutama yang terkait dengan pelayanan perizinan investasi baik yang berbentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta maupun Peraturan Walikota Yogyakarta secara ekspisit mencantumkan, menerapkan, maupun mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik walaupun Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan predikat terbaik di DIY maupun di Indonesia dalam pelayanan publik di bidang investasi.
- c. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman**, kajian ini diharapkan bisa memberikan gambaran dan masukan tentang pengimplementasian asas-asas umum yang baik dalam kebijakan-kebijakan layanan publik di bidang perizinan investasi di daerahnya yang secara eksplisit belum terlihat pada beberapa contoh kebijakan perizinan investasi yang dikaji dalam penelitian ini terutama yang berbentuk peraturan daerah dan peraturan bupati. Untuk selanjutnya dalam pembuatan kebijakan layanan perizinan investasi di masa-masa yang akan datang secara ekspisit diharapkan mencantumkan, menerapkan, maupun mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembuatan kebijakan layanan perizinan investasi pada produk-produk hukum di daerahnya, baik yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati, maupun surat keputusan bupati.
- d. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY maupun Kabupaten/Kota lain di Indonesia**, diharapkan hasil penelitian dan kajian ini bisa memberikan gambaran tentang pelaksanaan perizinan investasi dan

implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di wilayah kajian terutama Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diharapkan bisa direkomendasikan untuk memodifikasi pelaksanaan kebijakan layanan perizinan investasi di daerahnya dengan mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas-asas dalam layanan publik sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di wilayahnya sesuai dengan ketentuan asas-asas pelayanan publik. Diharapkan juga untuk daerah-daerah lain yang belum secara eksplisit mencantumkan, menerapkan, maupun mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk masa-masa yang akan datang dalam membuat kebijakan layanan perizinan investasi di daerahnya baik dengan produk hukum peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, surat keputusan bupati/kota maupun dalam bentuk produk-produk hukum lain di daerah mencantumkan, menerapkan, maupun mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- e. **Bagi masyarakat luas**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman.
- f. **Bagi Perguruan Tinggi**, diharapkan hasil penelitian dan kajian ini memberikan gambaran tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah di wilayah kajian sehingga bisa dipakai sebagai rujukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam melakukan pengabdian pada masyarakat dan dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis lainnya pada masa-masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian dan kajian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di DIY ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan pengetahuan bagi para dosen dan mahasiswa yang mempelajari Hukum Administrasi Negara tentang implementasi atau apikasi di lapangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara;

- b. Menambah wawasan pengetahuan bagi para dosen dan mahasiswa yang mempelajari Hukum Perdata/Hukum Bisnis mengenai materi hal-hal yang terkait dengan perizinan investasi/penanaman modal sebagai bagian dari materi Hukum Perdata/Hukum Bisnis;
- c. Menambah wawasan pengetahuan bagi para dosen dan mahasiswa yang mempelajari Kebijakan Publik mengenai materi tentang asas-asas umum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik.



## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian *sosio legal*, yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY dalam hal pelayanan publik administrasi penanaman modal khususnya bidang perijinan investasi dengan kategori baik (pada rancangan tahun pertama) untuk bisa dijadikan rujukan bagi daerah-daerah Kabupaten/Kota di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Penelitian ini melihat berbagai peraturan-perundang-undangan terkait dengan kebijakan pelayanan publik dan standar operasional pelayanan dalam administrasi penanaman modal, dan juga melihat bagaimana pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada tahun pertama (1) penelitian ini melihat dan mengkaji pelayanan publik administrasi penanaman modal khususnya bidang perizinan investasi pada Kabupaten/Kota di DIY yang pelaksanaannya dinilai pada peringkat satu (1) dan dua (2) terbaik, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

#### **B. Penentuan Lokasi/Wilayah Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan *purposive*, yakni pengambilan lokasi/wilayah penelitian dengan tujuan tertentu yaitu untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak dalam pelayanan publik bidang perizinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang mendapatkan peringkat satu (1) dan dua (2) terbaik di DIY.

Lokasi/wilayah dalam penelitian ini adalah instansi-instansi dari 2 (dua) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di DIY yang telah terpilih sebagai lokasi/ajang penelitian yang bertugas melakukan pelayanan publik bidang administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa nantinya akan diperoleh contoh implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak dalam pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY, yang dapat dipakai sebagai

rujukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam pelaksanaan pelayanan publik pada masyarakat dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah tertuang dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan pelaksanaan lainnya.

Langkah-langkah penentuan lokasi/wilayah penelitian adalah mencari informasi dan menetapkan Pemda Kabupaten/Kota 2 (dua) di DIY yang telah melaksanakan dengan baik asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang perizinan investasi sebagai lokasi/wilayah penelitian pada tahun pertama. Setelah didapatkan data dilapangan mengenai dua (2) Kabupaten/Kota yang memperoleh peringkat 1 dan 2 terbaik di DIY lalu dilacak instansi-instansi yang terkait dengan implementasi kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi di dua Kabupaten/Kota tersebut. Di Kota Yogyakarta karena Pemerintah Kota Yogya telah menetapkan bahwa perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) maka penelitian diadakan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan nara sumber adalah Sekretaris Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Kabag Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dan Kasi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman penelitian dilakukan di Kantor KP3M Sleman dan Kantor Perizinan Kabupaten Sleman, dengan nara sumber utama Kasi Perizinan di Kantor Perizinan Kabupaten Sleman. Di samping itu juga ditentukan 40 pengguna layanan perizinan sebagai subjek penelitian untuk mengecek pelaksanaan/implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi.

### **C. Objek Penelitian**

1. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan pemerintah dalam bidang pelayanan administrasi penanaman modal khususnya perijinan investasi baik peijinan investasi penanaman modal asing maupun modal dalam negeri termasuk industry kecil maupun industry kreatif;
2. Bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen resmi pemerintah baik dari pusat, Pemerintah DIY serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dijadikan wilayah penelitian seperti maklumat pelayanan publik, blanko-

blanko/format-format yang berkaitan dengan pelayanan publik dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pelayanan administrasi penanaman modal;

3. Data wawancara dengan pejabat/staff yang menangani kebijakan publik bidang pelayanan administrasi penanaman modal khususnya perijinan investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY yang terpilih sebagai sampel penelitian;
4. Data dari masyarakat terkait dengan kegiatan pelayanan publik yang pernah atau sedang memperoleh pelayanan publik terkait bidang administrasi penanaman modal khususnya peijinan investasi yang dilakukan oleh instansi-instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di DIY yang terpilih sebagai sampel penelitian.

#### **D. Langkah Kegiatan :**

Langkah-langkah kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji berbagai kebijakan pelayanan di bidang pelayanan administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda DIY, serta Kebijakan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah terpilih sebagai wilayah sampel penelitian yakni Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kebijakan-kebijakan ini baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun berupa keputusan-keputusan;
2. Mengkaji dan meneliti implementasi kebijakan pelayanan publik di bidang pelayanan administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi di masing-masing daerah yang menjadi sampel penelitian melalui wawancara dengan subjek penelitian, dokumentasi hal-hal yang terkait dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dan observasi pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelayanan perizinan Investasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan investasi;

3. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkaya analisis dan hasil sementara atau *progress* hasil penelitian, serta perbaikan-perbaikan hasil penelitian;
4. Penyusunan hasil akhir penelitian, bahan ajar Hukum Administrasi Negara serta pengiriman artikel ke jurnal nasional atau internasional sebagai luaran tahun pertama penelitian;

#### **E. Penentuan Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan kriteria-kriteria tertentu yakni para pejabat dilingkungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang pada tahun 2013 mendapatkan peringkat satu dan dua terbaik di DIY dalam pelayanan perizinan, dan mereka mengetahui hal-hal yang terkait dengan kebijakan pelayanan perizinan investasi di daerahnya pada tahun 2012-2013 sehingga daerah mereka diberikan predikat terbaik dalam layanan perizinan investasi dan mengetahui juga implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kegiatan pelayanan perizinan investasi di daerahnya serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas-asas tersebut. Subjek penelitian diperoleh melalui *snow ball sampling* setelah mendatangi **informan kunci** yakni **pimpinan instansi pelayanan publik dalam perijinan investasi di Pemda Kabupaten/Kota yang** terpilih menjadi wilayah penelitian.

Di samping itu juga ditentukan 40 pengguna layanan perizinan sebagai subjek penelitian yang bersal dari Kota Yogyakarta 20 subjek penelitian dan Kabupaten Sleman 20 subjek penelitian untuk mengecek pelaksanaan/implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi. Penentuan subjek penelitian yang merupakan pengguna layanan perizinan ditentukan secara acak yakni dengan mendatangi warga masyarakat yang sedang atau sudah pernah mendapatkan pelayanan publik di bidang administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi di wilayah sampel penelitian yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kantor Perizinan Kabupaten Sleman

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian tentang Studi Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan

Publik Perijinan Investasi di propinsi DIY ini adalah dengan mengkaji tata kelola pemerintahan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bidang administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi di Pemerintah kabupaten/Kota DIY, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan subjek penelitian dengan pedoman wawancara tidak terstruktur yang garis besarnya telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan pejabat/staff Pemda Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang berbentuk Kantor Pelayanan Satu Atap dilakukan terutama dengan Kasi Perizinan dilakukan pada tanggal minggu ke empat September 2013. Sebelumnya minggu keempat bulan Agustus 2003 dan awal bulan September 2013 dilakukan wawancara dengan pejabat di lingkungan Kantor KP3M Kabupaten Sleman. Wawancara dilakukan oleh Ketua Tim Peneliti dan Pembantu Peneliti. Sedangkan wawancara yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dilakukan pada awal bulan September, pertengahan bulan September dan awal bulan Oktober dengan Sekretaris Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Kabag Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dan Kasi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan oleh Ketua Tim Peneliti dan Anggota Peneliti serta pembantu peneliti.

Wawancara juga dilakukan dengan warga masyarakat pengguna layanan atau oleh para pejabat di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogya dan Kantor Pelayanan Perizinan Sleman disebut pemohon. Sebetulnya untuk pengguna layanan ini sudah dipersiapkan angket untuk diisi oleh mereka, namun setelah dicoba untuk diedarkan pada beberapa pengguna layanan ada yang tidak kembali dan mengisi dengan tidak lengkap akhirnya peneliti dan para pembantu peneliti mencoba mendatangi subjek penelitian masyarakat ini satu persatu sehingga di dapatkan kuesioner yang dikembalikan dan diisi oleh pengguna layanan sejumlah 40 kuesioner. Hal ini bisa dipahami/dimengerti oleh tim peneliti mengingat para pengguna layanan terutama di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta hanya memerlukan waktu yang sebentar untuk pengurusan perizinannya. Data dari pengguna layanan perizinan ini diperlukan untuk mengecek apakah asas-asas

umum pemerintahan yang baik/asas-asas pelayanan publik sudah dilaksanakan dalam proses perizinan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang peraturan-perundangan-undangan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik bidang administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai ajang penelitian. Di samping itu, dilakukan dokumentasi tentang pelaksanaan pelayanan publik di lapangan termasuk pengambilan foto-foto kegiatan pelayanan publik di instansi-instansi pelayanan publik di wilayah yang telah terpilih menjadi ajang penelitian dan gambar lokasi penelitian. Juga dokumentasi tentang pamflet-pamflet, brosur-brosur yang terkait dengan kegiatan pelayanan perizinan sehingga didapatkan deskripsi secara komprehensif tentang implementasi asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi.

Dari data dokumentasi kebijakan penanaman modal didapatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal khususnya perizinan investasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, maupun Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat di antaranya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal; Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pel[oran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Rara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Kebijakan dari Pemerintah Daerah, di antaranya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. **Kebijakan dari Pemda Kota Yogyakarta** di antaranya adalah Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang lingkupnya meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan (HO); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan; Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging, dan Perda-Perda lain terkait dengan perizinan Investasi di Kota Yogyakarta. Di samping itu, dalam kegiatan dokumentasi ini juga diperoleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Yogyakarta terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Yogyakarta, di antaranya: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; Perwal Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta; Perwal Kota Yogyakarta nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta; dan peraturan-peraturan walikota Yogyakarta lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan investasi. **Kebijakan dari Pemda Kabupaten Sleman**, di antaranya adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 208/A.KDH/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal Kabupaten Sleman; Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin; dan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan perizinan investasi di Kabupaten Sleman.

### **3. Observasi**

Tenik pengumpulan data dengan pengamatan digunakan untuk memperoleh data/gambaran tentang pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di lokasi-lokasi penelitian. Di amati bagaimana cara petugas-petugas dan para staf instansi pelayanan yang dijadikan lokasi penelitian dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi penanaman

modal khususnya perizinan investasi. Diamati juga maklumat-maklumat yang dipasang di lokasi pelayanan atau sekitar pelayanan, dan juga diamati hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di loket-loket/anjungan yang ada di dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Perizinan Sleman sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan pelayanan publik di bidang tersebut.

#### **4. *Focus Group Discussion***

Teknik ini dilakukan dengan nara sumber di bidang Hukum Administrasi Negara, Kebijakan Publik untuk “uji publik” mengenai studi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik di DIY yang akan direkomendasikan untuk dijadikan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Di samping itu kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam analisis hasil penelitian dan untuk memperbaiki draf laporan hasil penelitian sebelum diseminarkan.

#### **G. Teknik Analisis data**

Penelitian ini juga merupakan penelitian *juridis sosiologis (legal-sosio)*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan administrasi negara atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hukum perijinan investasi di Indonesia, dan juga melihat fakta-fakta pelaksanaan pelayanan perizinan investasi dan kenyataan-kenyataan empirik sosiologis yang terkait dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di lapangan, yang kemudian setelah data-data yuridis maupun sosiologis terkumpul di analisis untuk ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data yakni, reduksi data dengan cara memilah data-data yang relevan, kemudian diadakan kategorisasi dan unitisasi data untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik bidang administrasi penanaman modal atau perizinan investasi.



## **BAB 5**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Diskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi dari 33 propinsi di wilayah Republik Indonesia yang terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa yang terdiri dari satu (1) Kota dan empat (4) Kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Kulon Progo;
- b. Kabupaten Bantul;
- c. Kabupaten Gunung Kidul;
- d. Kabupaten Sleman; dan
- e. Kota Yogyakarta.

**Berdasarkan Buku Informasi Penanaman Modal Yogya tahun 2011** yang dikeluarkan oleh **Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM DIY** institusi yang mengkoordinir penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a. Propinsi DIY: Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM);
- b. Kabupaten Bantul: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop);
- c. Kabupaten Gunungkidul: Bagian Administrasi Perekonomian;
- d. Kabupaten Kulonprogo: Kantor Penanaman Modal
- e. Kabupaten Sleman: Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal
- f. Kota Yogyakarta: Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

Adapun institusi yang menangani perizinan terkait dengan investasi (penanaman modal) yaitu:

- a. Propinsi DIY: Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu
- b. Kabupaten Bantul: Dinas Perizinan
- c. Kabupaten Gunungkidul: Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP)
- d. Kota Yogyakarta: Dinas Perizinan
- e. Kabupaten Sleman: Kantor Pelayanan Perizinan.

Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi DIY merupakan kantor pelayanan satu atap yang melayani secara terpadu pemberian izin penanaman

modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang melakukan usaha di wilayah Yogyakarta.

Jenis-jenis perizinan dan non Perizinan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi DIY berdasarkan **Buku Informasi Penanaman Modal Jogja yang diterbitkan oleh Kantor Gerai Investasi Perizinan Terpadu BKPM DIY tahun 2011**, yaitu:

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan di Luar Kawasan Industri
6. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan di Kawasan Industri
7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal/Merger
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
9. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin
10. Perubahan Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin
11. Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin
12. Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan
13. Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan
14. Perpanjangan waktu Pengimporan Barang dan Bahan
15. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan
16. Angka Pengenal Produsen
17. Visa Masuk Bekerja
18. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

## **2. Kota Yogyakarta**

Jenis perizinan di Kota Yogyakarta terdiri dari perizinan investasi dan perizinan non investasi. Adapun jenis-jenis perizinan tersebut berdasarkan **Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**, yaitu:

1. Izin Membangun Bangunan-Bangunan (IMBB)
2. Izin In Gang
3. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah
4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan
5. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*/HO)

6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (*pendaftaran online*)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP MB)
9. Izin Usaha Angkutan
10. Izin Dispensasi Jalan
11. Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta
12. Izin Penyelenggaraan Parkir Tidak Tetap
13. Izin Usaha Angkutan
14. Izin Penyelenggaraan Reklame untuk papan nama usah/profesi yang melekat bangunan tempat usaha
15. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
18. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata;
  - b. Kawasan Pariwisata;
  - c. Jasa Transportasi Wisata;
  - d. Jasa Perjalanan wisata;
  - e. Jasa makanan dan Minuman;
  - f. Penyediaan Akomodasi;
  - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
  - i. Jasa Informasi Pariwisata;
  - j. Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k. Jasa Pramuwisata;
  - l. Wisata Tirta; dan
  - m. Solus per Aqua (SPA).
20. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah
21. Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah
22. Izin Penurunan dan Pengambilan Mata Air
23. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
24. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah
25. Izin Pemakaman

26. Izin Tenaga Kesehatan
27. Izin Sarana Kesehatan
28. Izin Salon Kecantikan
29. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal
30. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
31. Izin Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
32. Izin Jagal
33. Izin Penjual Daging
34. Izin Usaha Penggilingan Daging
35. Izin Usaha Penyimpanan Daging
36. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan
37. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima
38. Izin Penelitian (*pendaftaran online*)
39. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) (*pendaftaran online*)
40. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) (*pendaftaran online*)
41. Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman
42. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
43. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
44. Tanda Daftar Gudang (TDG)
45. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (*pendaftaran online*)
46. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
47. Tanda Daftar Pengobat Tradisional.

### **3. Kabupaten Sleman**

Adapun jenis perizinan yang dilayani berdasarkan **Buku Panduan Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang dikeluarkan bulan Desember 2012** ada 77 yang sebagian besar adalah jenis-jenis perizinan yang terkait dengan perizinan investasi, yaitu:

1. Izin Lokasi
2. Izin Pemanfaatan Tanah
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
4. Izin Konsolidasi Tanah
5. Pengesahan Rencana Tata Bangunan/ Site Plan
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
7. Izin Mendirikan Bangunan

8. Izin Reklame
9. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler
10. Rencana Tata Bangunan Luas Bangunan dan Luas Bangunan Terkena Sempadan
11. Rekomendasi Pecah Sertipikat Hibah
12. Rekomendasi Pecah Sertipikat Waris
13. Rekomendasi Pecah Sertipikat Jual Beli
14. Izin Gangguan
15. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
16. Tanda Daftar Perusahaan
17. Tanda Daftar Gudang
18. Tanda Daftar Industri
19. Izin Usaha Industri
20. Izin Perluasan Usaha
21. Izin Usaha Toko Modern
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
23. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
24. Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta
25. Izin Usaha Pondok Wisata
26. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, yang meliputi izin usaha: Balai Pertemuan; Barber Shop; Bazaar; Bioskop/Theater; Bowling; Dunia Fantasi; Fasilitas Wisata Tirta/Rekreasi Air; Fitnes/Panti Pijat; Karaoke/Cafe; Kolam Pemancingan; Kolam Renang; Padang Golf; Panggung Terbuka; Panggung Tertutup; Pasar Seni dan pameran; Pemandian Alam; Permainan dan Ketangkasan; Pertunjukan Temporer; Salon Rias; Sarana Olah Raga; Taman Rekreasi; Taman Satwa.
27. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati
28. Izin Usaha Rumah Makan
29. Izin Usaha Restoran
30. Izin Usaha Perkemahan Wisata
31. Izin Usaha Jasa Informasi Wisata
32. Izin Usaha Penginapan Remaja
33. Izin Mandala Wisata
34. Izin Usaha Kawasan Wisata

35. Izin Jasa Perjalanan Wisata
36. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata
37. Izin Usaha pramuwisata
38. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi khusus Hotel Berbintang
39. Izin Usaha Penyediaan Angkuta Wisata
40. Izin Usaha Jasa Konveksi, Perjalanan Insentif, dan Pameran
41. Izin Usaha Pengeboran
42. Izin Usaha Juru Bor
43. Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi
44. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
45. Izin Lokasi Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak
46. Izin Pertambangan Rakyat
47. Izin Usaha Angkutan
48. Izin Pengelolaan Tempat Parkir
49. Izin Trayek
50. Izin Prinsip Penanaman Modal
51. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
52. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
53. Izin Usaha Penanaman Modal
54. Izin Usaha Perluasan Modal
55. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal/Merger
56. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
57. Izin Bidan
58. Izin Apatek
59. Izin Toko Obat
60. Izin Optik
61. Izin Laboratorium Klinik
62. Izin Rumah sakit
63. Izin Perawat
64. Izin Praktek Dokter Umum
65. Izin Dokter Gigi
66. Izin Dokter Spesialis
67. Izin Dokter gigi Spesialis
68. Izin Klinik Pratama

69. Izin Klinik Utama
70. Izin Fisioterapi
71. Izin Dokter Hewan
72. Izin Pelayanan jasa Medik Veteriner
73. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Veteriner
74. Izin Tenaga Kesehatan Hewan WNA
75. Izin Menggunakan Ruang Milik Lalan
76. Izin Usaha Jasa Kontruksi
77. Izin Pembuangan Air Limbah.

## **B. Diskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Diskripsi Hasil Penelitian Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Pada Kebijakan Layanan Perizinan Investasi di Kota Yogyakarta**

Kegiatan pelayanan perizinan investasi di Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas ini merupakan kantor perizinan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) di Kota Yogyakarta berdasarkan pendelegasian/pelimpahan wewenang dalam hal penyelenggaraan perizinan dari Walikota Yogyakarta. Kewenangan-kewenangan yang melekat pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kasi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Wawancara tanggal 11 Oktober 2013), adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan penandatanganan izin pada instansi terkait yang telah dicabut melalui Perda Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing dinas dan menjadi fungsi dan tugas pada Dinas Perizinan. Dalam hal ini Dinas Perizinan bertindak selaku *front office, in office, dan back office*.
2. Kewenangan yang ada pada Dinas terkait dengan perizinan, yakni dalam hal: pemberian Izin; penolakan Izin; pencabutan Izin; legalisasi Izin; duplikat Izin; pengawasan Izin.
3. Beberapa Izin yang masih ditandatangani oleh instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian) selanjutnya sebagai

titipan di Dinas Perizinan, dalam hal ini Dinas Perizinan bertindak selaku *front office*

4. Sebagian kewenangan pelayanan perizinan dilimpahkan ke kecamatan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sebagai contoh: IMBB untuk bangunan dengan kriteria: luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup>, tidak bertingkat, kelengkapannya terletak di dalam kampung, tidak terkena Garis Sempadan Bangunan, untuk rumah tinggal; Izin Lokasi Pedagang kaki Lima; Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang; Izin Gangguan untuk usaha pondokan.

Jenis-jenis perizinan yang penyelenggaraannya ada kewenangan Dinas Perizinan Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 ada 34 perizinan. Berdasarkan keterangan Kepala Bagian Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Wawancara tanggal 11 Oktober 2013), dan juga terlihat dari maklumat tentang jenis-jenis perizinan yang terpampang di papan pengumuman ruang layanan perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pada tahun 2013 ada izin-izin yang disederhanakan dan disatukan dalam layanannya sehingga menjadi 31 jenis dan sebagian besar dari jenis-jenis perizinan tersebut adalah izin-izin yang terkait dengan kegiatan investasi. Berdasarkan keterangan Kepala Bagian Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta beberapa jenis izin oleh Walikota Yogyakarta didelegasikan kepada pemerintah kecamatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta Dinas Perizinan melakukan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan cakupan kegiatan: sosialisasi perizinan, *advice planning*, pelayanan proses perizinan, dan pengawasan perizinan.

Setelah diadakan penelitian di lapangan dengan teknik dokumentasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta didapatkan beberapa contoh kebijakan perizinan investasi yang berupa produk-produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Beberapa contoh kebijakan pelayanan perizinan investasi yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, di antaranya yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering;



- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat izin Usaha jasa Konstruksi;
- d. Perda Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;
- e. Perda Kota Yogyakarta Nomo 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan;
- f. Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- g. Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- j. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
- k. Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Sedangkan contoh-contoh Peraturan Walikota Yogyakarta yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan investasi di Kota Yogyakarta berdasarkan dokumentasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yakni:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket;
- e. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- f. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan;
- g. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
- h. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta;
- i. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008; dan
- j. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangunan (IMBB).

## **2. Diskripsi Hasil Penelitian Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Pada Kebijakan Layanan Perizinan Investasi di Kabupaten Sleman**

Kegiatan perizinan di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dan efektif berjalan tanggal 4 Januari 2010 dengan dasar Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan ini merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berbeda dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang sudah berbentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dimana dinas ini sudah bertindak sebagai *front office*, *in office*, dan *back office*. Sementara Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman masih berupa pelayanan terpadu satu atap (PTSA) di mana kantor ini hanya bertindak sebagai *front office*, proses dan penandatanganan perizinan masih berada pada instansi teknis pengampu perizinan. Kantor ini bertugas untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan termasuk perizinan di bidang

investasi. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman melayani 77 jenis perizinan, namun demikian berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 12 tahun 2001 tentang Izin Gangguan kewenangan yang dipunyai kantor ini hanya untuk memproses dan menandatangani perizinan Izin Gangguan.

Berdasarkan **Buku Panduan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang dikeluarkan pada bulan Desember 2012**, dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, selain dibuka akses informasi kantor ini juga memberikan layanan antara lain:

- a. Petugas penghubung yang berfungsi menjadi penghubung antara pemohon yang telah mendaftarkan pelayanan izin dengan memberikan informasi apabila dalam proses perizinan ada kekurangan syarat, permasalahan administrasi maupun teknis dari pengecekan lapangan serta informasi bila izin telah selesai diproses berikut beserta besarnya retribusi yang harus dibayarkan;
- b. SMS Gateway dengan cara kantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman mengirimkan informasi pemberitahuan izin yang sudah jadi ke nomor telepon pemohon melalui aplikasi SMS Gateway.

Adapun contoh-contoh produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman setelah diadakan studi dengan dokumentasi didapatkan beberapa contoh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman. Beberapa contoh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang terkait dengan perizinan investasi di Daerah kabupaten Sleman, yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
3. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
4. Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Sedangkan beberapa contoh Peraturan Bupati Sleman yang diperoleh berdasarkan studi dokumentasi, yaitu:

Beberapa Contoh kebijakan perizinan investasi dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setelah dicermati secara eksplisit belum mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
5. Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB
6. Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB;

### **3. Diskripsi Hasil Penelitian Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Perizinan Investasi Di Kota Yogyakarta**

Setelah didapatkan data lapangan baik berdasarkan dokumentasi, wawancara, serta observasi dapat dikemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik sudah dilaksanakan, baik itu asas **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan**, sudah dilaksanakan dengan baik.

Dari data dokumentasi didapatkan sebuah Laporan Penelitian Doing Bisnis di Indonesia tahun 2012 yang dikeluarkan oleh *Advisory Services International Finance Corporation* (IFC) Indonesia dan *Global Indicators and Analysis Department* dari Group Bank Dunia bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2012: hal 2) yang melaporkan bahwa di seluruh Indonesia, posisi kota dengan proses termudah untuk mendirikan usaha diduduki oleh Yogyakarta, untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan diduduki oleh Balikpapan, dan untuk mendaftarkan properti diduduki oleh Bandung dan Jakarta. Laporan ini mendukung hasil penelitian di lapangan tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan layanan perizinan di Kota Yogyakarta

Beberapa dokumentasi/foto-foto/gambar-gambar berikut ini memperlihatkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pelaksanaan perizinan investasi di Kota Yogyakarta.

Gambar nomor 1 dan nomor 2 berikut ini memperlihatkan pelaksanaan kegiatan *advice planning* yang dilaksanakan oleh para petugas dengan mengindahkan **asas keterbukaan, asas keprofesionalan, asas keseimbangan hak dan kewajiban**. Kegiatan *advice planning* Pemohon dapat meminta layanan *advice planning* dalam rangka pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta terkait dengan perencanaan izin bangunan dan jenis usaha yang diperkenankan. Layanan *advice planning* tidak dipungut biaya. Hal ini dapat dilihat dari maklumat yang dipasang di papan pengumuman dalam ruangan pelayanan perizinan.

**Gambar 1 Kegiatan Advise Planning**



**Sumber: Dokumen Penelitian**

**Gambar 2. Kegiatan Layanan Advice Planning**



**Sumber: Dokumen Penelitian**

Gambar nomor 3 berikut ini memperlihatkan loket-loket pelayanan perizinan yang dibagi dalam beberapa jenis perizinan termasuk perizinan yang terkait dengan investasi sehingga memudahkan pengguna layanan dalam mengurus proses perizinan. Gambar tersebut memperlihatkan telah diimplementasikannya asas kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan publik perizinan investasi.

**Gambar 3. Loker-Loker Pengurusan Perizinan**



**Sumber: Dokumen Dinas Perizinan Kota Yogyakarta**

Adapun gambar nomor 5 dan nomor 6 di bawah ini memperlihatkan maklumat tentang jenis-jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang memperlihatkan asas kepastian hukum dan asas transparansi. Di dalam maklumat tersebut dicantumkan juga lama waktu dalam proses pengurusan perizinan, legalisir perizinan dan pengurusan duplikasi perizinan. Ada atau tidaknya biaya perizinan/retribusi di dalam pelayanan perizinan juga dicantumkan di sana, beserta keterangan tentang perhitungan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pengguna layanan perizinan. Terlihat dari gambar papan pengumuman/maklumat tersebut bahwa hanya ada dua (2) jenis perizinan yang terkait dengan investasi yang dikenai retribusi yaitu IMB dan izin Gangguan dengan diberitahukan/diberi keterangan cara perhitungan retribusi tersebut. Dari penggalan gambar yang terlihat pada gambar nomor 6 terlihat dicantumkan adanya pengumuman tentang waktu yang diperlukan dalam penyelesaian proses perizinan. Di gambar nomor 5 dan 6 tersebut terlihat bahwa **asas kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas, kemudahan serta keterjangkauan.**



**Gambar 5. Maklumat tentang Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan**

Sumber: Dokumen penelitian

**Gambar 6. Penggalan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan**

No.	Jenis Izin	Waktu (hari kerja)				RETRIBUTSI
		Izin	Penyediaan	Duplikat	Respon Pemaduan	
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a. Bangunan Sederhana b. Bangunan tidak pakai hitungan konstruksi c. Bangunan pakai hitungan konstruksi	10 14 17	4	7	3	Ada *)
2.	Izin In Gang	6	2	3	3	Tidak Ada
3.	Izin Penyambungan Air Limbah	6	2	3	3	Tidak Ada
4.	Izin Penyambungan air Hujan	6	2	3	3	Tidak Ada
5.	Izin Gangguan a. Gangguan Kecil / Sedang b. Gangguan Besar	3 11	2	3	3	Ada **)
6.	Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)	7	2	3	3	Tidak Ada
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	2	3	3	Tidak Ada
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)	3	2	3	3	Tidak Ada
9.	Izin Usaha Angkutan	3	2	3	3	Tidak Ada
10.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	7	2	3	3	Tidak Ada
11.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	3	2	2	3	Tidak Ada
12.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP)	3	2	2	3	Tidak Ada
13.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3	2	2	3	Tidak Ada
14.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5	2	3	3	Tidak Ada
15.	Izin Pemakaman dan Pengusahaan Air Tanah	9	2	3	3	Tidak Ada
16.	Izin Perusahaan Pengusahaan Air Tanah	9	2	3	3	Tidak Ada
17.	Izin Juru Bor air Bawah Tanah	4	2	3	3	Tidak Ada
18.	Izin Pemakaman a. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Swasta b. Pengelolaan Krematorium Milik Swasta c. Pengelolaan Tempat penyimpanan Abu Jenazah Milik Swasta	5	2	3	3	Tidak Ada
19.	Izin Selon Kecamatan	7	2	3	3	Tidak Ada
20.	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal	10	2	3	3	Tidak Ada
21.	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal	7	2	3	3	Tidak Ada
22.	Izin Penjual Daging	5	2	3	3	Tidak Ada
23.	Izin Pengusaha Penggilingan Daging	5	2	3	3	Tidak Ada
24.	Izin Pengusaha Penyimpanan Daging	2	2	2	3	Tidak Ada
25.	Izin Penelitian	2	2	2	3	Tidak Ada
26.	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	2	2	2	3	Tidak Ada
27.	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	2	2	3	Tidak Ada
28.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	2	2	3	Tidak Ada
29.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	2	2	3	Tidak Ada
30.	Surat Tanda Pendaftaran Weralabe (STPW)	3	2	2	3	Tidak Ada

Sumber: Dokumen Penelitian

Gambar nomor 6 di bawah ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan **asas keprofesionalan** dan **asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif** pada pengguna layanan. Terlihat dari gambar tersebut bahwa petugas dengan profesional mengarahkan dan menjelaskan pada pengguna layanan agar mereka mengambil nomor antrian pada layar sentuh yang telah disediakan untuk mengambil nomor antrian pelayanan perizinan, sehingga



dalam pelaksanaan proses perizinan yang dilakukan di loket-loket pelayanan dilaksanakan sesuai dengan nomor urut antrian. Gambar ini juga memperlihatkan bahwa telah dilaksanakan **asas kesamaan hak, keterbukaan; akuntabilitas; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan** dalam pengurusan perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Hal ini juga diperkuat berdasarkan pengamatan dalam penelitian para pengguna layanan dalam menunggu proses pelayanan di ruang tunggu tidak memerlukan waktu yang lama.

**Gambar 6. Layar Sentuh Antrian**



Sumber: Dokumen Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Sedangkan gambar nomor 8 dan nomor 9 berikut ini memperlihatkan Pintu masuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dari arah depan, arah kiri dan dari arah kanan yang memperlihatkan adanya fasilitas bagi kelompok rentan dan defabel untuk memasuki Ruang Pelayanan Perizinan. Dari gambar ini terlihat bahwa sudah dilaksanakan **asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan juga asas kepentingan umum** sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik yang mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik termasuk di dalamnya layanan di bidang perizinan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

**Gambar 8. Pintu Masuk Ruang Pelayanan Perizinan Kota Yogyakarta**



Sumber: Dokumen Penelitian

**Gambar 9. Arah Kanan Pintu Masuk Ruang Pelayanan Perizinan**



Sumber: Dokumen Penelitian

#### **4. Diskripsi Hasil Penelitian Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Perizinan Investasi Di Kabupaten Sleman**

Berikut ini dipaparkan diskripsi yang menggambarkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman yakni terlihat dari hasil pengamatan (observasi) dan pengambilan gambar-gambar di lokasi penelitian Kabupaten Sleman. Terlihat bahwa di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman telah memberikan sarana/fasilitas bagi kelompok rentan dan defabel, adanya petugas-

petugas pemandu layanan yang dengan ramah melayani pengguna layanan, layar sentuh untuk mendapatkan nomor antrian yang menunjukkan implemetasi dari **asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kesamaan hak dan kewajiban**, loket pelayanan perizinan yang dibuat rapi dan nyaman yang memperlihatkan telah dilaksanakannya keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh layanan, ruang tunggu yang cukup representatif yang berada di depan loket pelayanan,

Di samping itu juga terdapat maklumat-maklumat yang berisi tentang petunjuk pelayanan, proses-proses untuk memperoleh layanan perizinan, dan maklumat-maklumat lain yang memperlihatkan adanya fasilitas-fasilitas untuk memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan, beserta fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana lainnya yang menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan pengamatan dari tim peneliti jumlah para pengguna/pemohon layanan perizinan di Kabupaten Sleman setiap harinya lebih banyak bila dibandingkan dengan pengguna layanan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan dari Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Sleman rata-rata tiap hari lebih kurang seratus (100) orang minimal 60 orang (Wawancara tanggal 24 September 2013). Hal ini dapat dipahami karena jumlah jenis-jenis perizinan investasi yang ada di Kabupaten Sleman (77 jenis perizinan) dan semuanya diajukan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten sleman yang bertindak selaku *front office* lebih banyak bila dibandingkan dengan jenis perizinan yang ada di Kota Yogyakarta yang hanya 47 jenis perizinan. Kewenangan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada tahun 2013 hanya menangani 31 jenis perizinan dan sebagian besar termasuk jenis-jenis perizinan yang terkait dengan perizinan investasi. Hal ini bisa dilihat dari kajian tentang diskripsi jenis-jenis perizinan di Kota Yogyakarta dan jenis-jenis perizinan di Kabupaten Sleman yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dari laporan penelitian ini. Di samping itu wilayah Kabupaten Sleman juga lebih luas bila dibandingkan dengan wilayah Kota Yogyakarta, dan untuk jenis-jenis perizinan tertentu di Kota Yogyakarta cukup diselesaikan melalui Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

Gambar-gambar berikut ini menunjukkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik perizinan investasi di

Kabupaten Sleman, walaupun pelaksanaannya memang belum sebaik Kota Yogyakarta. Gambar nomor 10 memperlihatkan pintu masuk Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang memperlihatkan aksesibilitas untuk defabel dan golongan rentan. Dari gambar tersebut memperlihatkan bahwa **asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas kepentingan umum, asas kemudahan serta keterjangkauan**, sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU Pelayanan Publik telah dilaksanakan dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman.

**Gambar 10. Pintu Masuk Kantor Pelayanan Perizinan Kab Sleman**



Sumber: Dokumen Penelitian

Gambar nomor 11 dan 12 memperlihatkan layar sentuh untuk mengambil nomor antrian pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang letaknya ada di dalam ruang pelayanan perizinan dan berada di dekat tempat duduk untuk menunggu antrian layanan perizinan, loket-loket layanan perizinan. Gambar ini memperlihatkan bahwa telah dilaksanakan **asas kepentingan umum, asas kesamaan hak dan asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif** seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta telah memperlihatkan kenyamanan bagi pengguna layanan untuk menunggu antrian layanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman.

**Gambar 11. Nomor Loker-loket Antrian**



Sumber: Dokumen penelitian

**Gambar 12. Layar Sentuh Antrian**



Sumber: Dokumen Penelitian

Adapun gambar nomor 13 memperlihatkan proses layanan perizinan oleh para petugas di Kantor Pelayanan Perizinan Sleman setelah pemanggilan sesuai nomor urut antrian. Memang berdasarkan pengamatan, loket layanan perizinan di Kabupaten Sleman belum seperti layanan di Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang sudah dibagi menjadi beberapa loket sesuai dengan jenis perizinan yang sudah ditentukan. Pada pelayanan perizinan di Kabupaten sleman hanya dituliskan nomor-nomor meja sesuai jenis pelayanan untuk memudahkan pengguna layanan dalam mengurus perizinan. Hal itu juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Perizinan Kabupaten Sleman (Wawancara tanggal 24 September



2013) bahwa memang layanan perizinan di kabupaten Sleman belum sebaik seperti layanan di Kota Yogyakarta yang telah banyak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan berdasarkan penilaian dan mendapatkan penilaian nomor 4 terbaik di dunia.

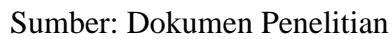
**Gambar 13. Loker Pelayanan Perizinan Kantor Perizinan Sleman**



Sumber: Dokumen Penelitian

Gambar 14 memperlihatkan mekanisme pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, untuk memudahkan para pengguna layanan dalam mengurus perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Dikarenakan proses perizinan investasi masih dilakukan oleh instansi terkait, dan hanya proses perizinan Izin Gangguan yang diproses di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, maka terlihat dalam gambar nomor 15 mengenai mekanisme pelayanan Izin Gangguan yang telah dijelaskan secara detail. Dari 77 jenis perizinan yang ada di kabupaten Sleman, baru 1 (satu) yang kewenangan proses penyelesaiannya ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman sehingga mekanisme penyelesaian proses perizinannya bisa dibuat secara jelas oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Jawaban 20 responden yang diedarkan di Kabupaten Sleman, 7 di antaranya menyatakan bahwa biaya pengurusan tidak diumumkan secara transparan. Kesesuaian waktu yang diumumkan dengan penyelesaian proses perizinan 5 responden menyatakan belum ada kesesuaian. Berdasarkan keterangan Kasi Perizinan Kabupaten Sleman Wawancara tanggal 24 September 2013), seringkali perizinan tertentu penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, dan Kantor Perizinan Kabupaten Sleman seringkali juga tidak

### Gambar 14 Maklumat Mekanisme Layanan Perizinan

[illegible]

Sumber: Dokumen Penelitian

## **5. Diskripsi Hasil Penelitian tentang Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Asas-asas Umum pemerintahan yang baik**

### **a. Hambatan-hambatan di Kota Yogyakarta**

Walaupun Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang asas-asas dalam pelayanan publik, namun demikian berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Wawancara tanggal 24 September 2013) masih ada hambatan dalam beberapa pelaksanaan proses perizinan. Beberapa hambatan tersebut di antaranya, adalah:

- 1) Pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta sudah dilakukan dengan menggunakan pelayanan terpadu satu pintu, namun masih ada beberapa jenis perizinan investasi yang prosesnya diselesaikan oleh dinas terkait, walaupun penandatanganan Surat Keputusan/Surat Ketetapan izin dilakukan oleh Kepala Dinas Perizinan. Sebagai contoh beberapa jenis perizinan yang terkait dengan usaha perdagangan, proses masih ditangani oleh Dinas Perdagangan dan dalam hal ini Dinas Perizinan hanya bertindak sebagai *front office*, walaupun penandatanganan surat ketetapan perizinan dilakukan oleh Kepala Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- 2) Hambatan lain walaupun tidak banyak berpengaruh dalam kegiatan pelayanan perizinan, yakni masih terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang benar-benar memahami kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun propinsi DIY dalam hal pelayanan publik di bidang perizinan investasi, sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implemetasi asas-asas umumyang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kota Yogyakarta.

### **b. Hambatan-hambatan di Kabupaten Sleman**

Kantor Pelayanan perizinan Kabupaten Sleman belum berbentuk PTSP dan merupakan satu unit pelayanan terpadu satu atap dan berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Perizinan Kabupaten Sleman (Wawancara tanggal 24 September 2013) baru diberi kewenangan sebagai *front office* dalam pelayanan perizinan. Kewenangan yang diberikan baru dalam proses



penyelesaian Izin Gangguan, sehingga untuk mengimplementasikan asas-asas umum yang baik dalam layanan perizinan investasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengalami beberapa hambatan, yakni:

- 1) Karena penyelesaian proses perizinan ada pada instansi terkait, maka waktu penyelesaian perizinan tergantung pada kelengkapan syarat-syarat yang diajukan oleh pengguna layanan dan penyelesaian di instansi masing-masing yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama;
- 2) Penandatanganan surat keputusan/ketetapan izin menjadi kewenangan instansi terkait dengan perizinan investasi. Sedangkan Kantor Pelayanan Perizinan Sleman hanya diberi kewenangan untuk menerima berkas permohonan dari pemohon, dan menyerahkan Surat Keputusan Izin yang telah diselesaikan prosesnya oleh instansi terkait.
- 3) Kewenangan untuk pemrosesan perizinan investasi kecuali Izin gangguan, masih berada pada instansi terkait, sehingga seringkali kesulitan untuk memantau proses penyelesaian perizinan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Layanan Perizinan Investasi Di Pemerintah Kota Yogyakarta**

Setelah diteliti dan dikaji kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari pemerintah daerah Propinsi DIY. Berbagai peraturan perundang-undangan pusat terkait dengan penanaman modal termasuk perizinan investasi dari pusat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta maupun Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Contoh-contoh dari kebijakan dalam bentuk produk-produk hukum Kota Yogyakarta sudah dipaparkan dalam Diskripsi Hasil Penelitian

Peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Di samping itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi, dan peraturan perundang-undangan pusat lainnya.

Terkait dengan Kebijakan Pemerintah DIY dalam perizinan investasi di Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY hanya bertindak sebagai lembaga koordinasi, tidak berhak membuat kebijakan dan pengaturan terhadap kebijakan perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Hal ini terkait dengan kebijakan pengaturan tentang kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari

ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas menghendaki bahwa kepada daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (pusat). Prinsip nyata dan bertanggungjawab menghendaki bahwa daerah dalam melaksanakan otonominya untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pelayanan administrasi penanaman modal (termasuk di dalamnya perizinan investasi) dalam lingkup kabupaten/kota adalah urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan administrasi penanaman modal termasuk di dalamnya perizinan investasi di kabupaten/kota di Indonesia mendasarkan diri pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia di dalam melaksanakan otonomi daerahnya mengacu pada kebijakan-kebijakan yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagaimana telah dijelaskan di muka. Kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta sudah memperlihatkan implementasi terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Beberapa contoh kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang sudah memperlihatkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan pelayanan perizinan investasi, di antaranya yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering. Setelah dikaji dan dianalisis dalam secara implisit Perda tersebut sudah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, secara implisit juga sudah megimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat izin Usaha Jasa Konstruksi, secara implisit sudah memperlihatkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- d. Perda Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan, secara implisit sudah mensiratkan implementasi beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- e. Perda Kota Yogyakarta Nomo 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan, secara implisit sudah menyiratkan diimplementasikannya beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f. Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, secara implisit juga sudah menyiratkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- l. Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik, secara implisit sudah memperlihatkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- m. Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging, sudah menyiratkan implementasi beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Perda ini secara eksplisit sudah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 dari Perda Kota tersebut, yang menyatakan bahwa Kepariwisata (di Yogyakarta) diselenggarakan berdasarkan asas:
  - 1) manfaat;
  - 2) kekeluargaan;
  - 3) pemerataan;
  - 4) keseimbangan;
  - 5) kemandirian;
  - 6) kelestarian;
  - 7) partisipatif;
  - 8) berkelanjutan;
  - 9) demokratis;
  - 10) kesetaraan;
  - 11) kesatuan; dan
  - 12) profesionalisme.
- o. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung sudah mengimplimentasikan secara rinci dan eksplisit asas-asas umum

pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termasuk akses untuk defabel;

- p. Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, secara implisit sudah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Setelah diadakan kajian terhadap peraturan daerah- peraturan daerah Kota Yogyakarta tersebut di muka terlihat bahwa beberapa peraturan daerah sudah memperlihatkan adanya implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dituangkan secara implisit maupun eksplisit. Beberapa Peraturan daerah yang baru menyiratkan secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut bisa kita pahami mengingat bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik, baru dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Sedangkan untuk kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan walikota, seperti:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu, secara implisit sudah menyiratkan implikasi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah menyiratkan implementasi beberapa asas, walaupun tidak terlihat banyak implementasi karena aturan ini hanya berisi enam (6) pasal;
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, secara implisit sudah menyiratkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, sudah menyiratkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, walaupun jumlahnya tidak banyak karena jumlah pasal-pasal di dalamnya tidak banyak;

- e. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan;
- f. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan, sudah menyiratkan diimplementasikannya asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- g. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta, secara implisit sudah menyiratkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- h. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008; dan
- i. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangunan (IMBB).

Setelah diadakan kajian terhadap kebijakan pelayanan publik terkait dengan pelayanan perizinan investasi yang berupa peraturan walikota tersebut baru terlihat secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## **2. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Layanan Perizinan Investasi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman**

Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi di Kabupaten Sleman seperti halnya juga implementasi pada pelayanan publik bidang perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Implementasi kebijakan perizinan investasi di Kabupaten sleman mengacu juga pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Propinsi DIY hanya bertindak sebagai lembaga koordinasi, tidak berhak membuat kebijakan dan pengaturan terhadap kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Hal ini terkait dengan kebijakan pengaturan tentang kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas menghendaki bahwa kepada daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (pusat). Prinsip nyata dan bertanggungjawab menghendaki bahwa daerah dalam melaksanakan otonominya untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Kabupaten Sleman dalam membuat kebijakan perizinan investasi juga mengacu dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi kewenangannya, yakni ketentuan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pelayanan administrasi penanaman modal (termasuk di dalamnya perizinan investasi) dalam lingkup kabupaten/kota adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Sleman.

Sebagaimana kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman juga membuat kebijakan perizinan investasi yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari pemerintah daerah Propinsi DIY. Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dituangkan dalam berbagai bentuk hukum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman, dan Keputusan Bupati Sleman.

Peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar

Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi,; dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa contoh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang terkait dengan perizinan investasi di Daerah kabupaten Sleman, yakni:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- c. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
- d. Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Setelah diadakan kajian dengan cara mencermati isi dari ketentuan yang dimuat dalam peraturan-peraturan daerah Kabupaten Sleman yang dijadikan contoh tersebut secara eksplisit belum mencantumkan adanya asas-asas umum



pemerintahan yang baik, baru ada beberapa Perda yang secara implisit memperlihatkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai juga dengan apa yang dikemukakan oleh pejabat di lingkungan Kantor Penguatan, Penyertaan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sleman (Wawancara tanggal 11 September 2013) yang menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik belum diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman.

Beberapa Contoh kebijakan perizinan investasi dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman dan Keputusan Bupati Sleman, yakni:

- a. Peraturan Bupati sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setelah dicermati secara eksplisit belum mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, setelah dikaji baik secara implisit maupun eksplisit belum memperlihatkan implemenatasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern, secara implisit maupun eksplisit belum memperlihatkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Pembebasan Retribusi daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, secara implisit sudah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, secara implisit sudah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

### **3. Implementasi Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Investasi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Kajian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi Di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada layanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan melihat apakah pelaksanaan layanan tersebut sudah mengindahkan asas-asas pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut yakni asas: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan ketepatan, kemudahan serta keterjangkauan.

Setelah didapatkan data dilapangan baik berdasarkan dokumentasi, wawancara, serta observasi dapat dikemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik sudah dilaksanakan, baik itu asas **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan.** Sudah dilaksanakan dengan baik.

Hal ini terlihat dari 20 pengguna layanan yang diberikan kuesioner dan di wawancarai menyatakan bahwa pelaksanaan asas-asas pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan cukup baik, bahkan beberapa pengguna layanan menyatakan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dan hanya ada satu pengguna layanan yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik masih kurang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada para pengguna layanan (responden) terkait dengan bagaimana para petugas di dalam melayani pemohon; apakah pemohon sudah mendapatkan keadilan dalam pelayanan termasuk; adakah diskriminasi dalam pelayanan; apakah petugas pelayanan sudah melakukan tugasnya secara profesional, hormat, ramah dan sopan; apakah prosedur perizinan diumumkan secara jelas dan transparan termasuk untuk biaya-biaya yang diperlukan; apakah prosedur yang dimaklumkan mudah untuk difahami; apakah persyaratan pelayanan sesuai

denagn jenis pelayanan; adakah fasilitas-fasiitas dan sarana khusus bagi kelompok rentan misalnya untuk orang tua dan defabel; apakah besarnya biaya yang diperlukan sebanding dengan hasil yang diperoleh; adakah kesesuaian waktu dengan selesainya pengurusan perizinan; bagaimanakah kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan; bagaimanakah kecepatan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan; bagaimanakah keamanan lingkungan dalam pengurusan perizinan; apakah sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi, teratur sehingga memberikan rasa nyaman.

Pernyataan-pernyataan dari responden mengenai telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perizinan investasi di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari Lampiran Rekap Data Kuesiner

Pernyataan pengguna layanan perizinan mengenai sudah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pelayanan Publik tersebut juga didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa setiap dua (2) bulan sekali dilakukan *in house traning* bagi para petugas terkait dengan kegiatan pelayanan perizinan. Juga terlihat dari hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang setiap bulan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata terakhir pada tahun 2013 bulan yang dinalisis sampai dengan bulan Juni 2013 memperlihatkan bahwa untuk perizinan yang terkait dengan kegiatan investasi, yakni Izin Membangun Bangun Bangunan: 80, 33; Izin Gangguan: 81, 86; Surat Izin Usaha Perdagangan: 81, 48; Tanda daftar Perusahaan: 82,55; Tanda Daftar Usaha Pariwisata: 84, 52; jenis izin lainnya: 84, 54.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipakai sebagai dasar pengukuran kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan investasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berbentuk kuesioner yang diedarkan pada setiap pengguna layanan yang kemudian diisi oleh pengguna layanan pada saat mereka selesai melakukan proses permohonan periznan yang berisi pertanyaan terkait dengan pelayanan perizinan yang mereka peroleh dari para petugas layanan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengacu pada ke 14 butir indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi

negara atau birokrat yang termuat di dalam Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 dan Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yakni terkait dengan:

1. Prosedure pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kemudahan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yakni persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepatian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya;
4. kedisiplinan pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. kemampuan petugas dalam pelayanan, yakni tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara pelayanan;
8. keadilan dalam mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitusikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. kepastian biaya, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan;
14. keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat kamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dari penilaian IKM yang dilakukan oleh pengguna layanan yang dengan menggunakan standar Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009 dengan penilaian rata-rata lebih dari 81 tersebut di atas, setelah dilakukan pengamatan oleh peneliti dengan menggunakan kriteria asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimuat dalam ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik yang hampir sama dengan ketentuan Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009 dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan layanan publik bidang perizinan investasi.

Setelah diadakan analisis terhadap data dokumentasi, wawancara dan observasi terlihat bahwa proses dan prosedur pengurusan perizinan investasi di Kota Yogyakarta cukup mudah dan tidak berbelit-belit, tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hampir semua jenis perizinan tidak memerlukan biaya karena tidak ditarik retribusi. Hal ini memperlihatkan telah dilaksanakannya **asas keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan.** Berikut ini adalah diskripsi tentang proses pengurusan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta:

- a. Pemohon izin datang langsung ke Dinas Perizinan untuk mengurus izin-izin yang terkait dengan kegiatan investasi di Kota Yogyakarta seperti SIUP, TDP,

IMB, Izin Gangguan dan izin-izin lainnya Penelitian. Pengguna layanan perizinan dapat mendaftarkan proses perizinannya *secara online*;

- b. Mengambil nomor antrian melalui layar sentuh setelah pengguna layanan datang di kanotor Perizinan Kota Yogyakarta;
- c. Memasukkan berkas ke loket sesuai jenis izin yang dimohonkan. Pemeriksaan berkas oleh petugas loket (syarat lengkap didaftar, bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon). Apabila tanpa dicek lapangan, izin langsung diproses;
- d. Penelitian lapangan (untuk izin yang perlu cek lapangan). Bila berkas yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan maka permohonan izin ditolak dan bila sesuai diproses untuk diterbitkan izinnya;
- e. Setelah izin selesai diproses dan ditetapkan keputusannya, setelah pemohon diberitahukan melalui surat maupun petugas penghubung untuk pengambilnya;
- f. Untuk perizinan yang dikenai retribusi, pemohon dibuatkan slip pembayaran retribusi dan membayarkan sendiri ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang membuka Cabang di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- g. Setelah membayar retribusi untuk perizinan yang dikenai retribusi, pemohon/pengguna layanan perizinan mengambil izin dengan menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, selain dibukanya berbagai akses informasi, maka Dinas Perizinan mempunyai berbagai program antara lain :

- a. Pelayanan Secara Paralel, yakni pelaksanaan pelayanan di mana berbagai jenis perizinan yang berkorelasi dapat dilayani dalam satu waktu dan persyaratan yang sama tidak perlu dilampirkan lagi untuk masing-masing jenis izin yang dimohonkan, misalnya : mengajukan permohonan Izin Gangguan sekaligus mengurus SIUP dan TDP;
- b. *Advice Planning*, adalah kegiatan pelayanan perizinan yang terkait dengan tata ruang Kota Yogyakarta maka pemohon dapat meminta layanan *advice planning* dalam rangka tata ruang dalam perencanaan izin bangunan dan jenis usaha yang diperkenankan. Layanan *advice planning* tidak dipungut biaya;
- c. *Routing Slip*, adalah suatu kegiatan yang merupakan sarana pengendalian proses izin mulai pelayanan oleh petugas *front office* hingga *back office* yakni penyerahan keputusan pemberian izin yang dilaksanakan baik secara manual

maupun melalui dukungan teknologi informasi sehingga sehingga tahapan pelayanan dapat terpantau;

- d. Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper), merupakan wahana layanan konsultasi terhadap rencana izin bangunan/usaha sebelum didaftarkan yang bersifat komprehensif kepada pemohon, sehingga pada waktu pendaftaran dan pemrosesan izin tidak terdapat kendala lagi dan izin dapat ditetapkan sesuai/sebelum batas waktu yang ditentukan. Untuk memperoleh pelayanan ini tidak dipungut biaya;
- e. Petugas Penghubung, kegiatan ini dilakukan dengan cara Dinas Perizinan Kota Yogyakarta menugaskan Petugas Penghubung yang berfungsi menjadi penghubung antara pemohon yang telah mendaftarkan pelayanan izin dengan memberikan informasi apabila dalam proses perizinan ada kekurangan syarat, permasalahan administrasi maupun teknis dari pengecekan lapangan serta informasi apabila izin telah selesai diproses berikut besarnya retribusi yang harus dibayarkan. Kegiatan ini salah satunya dimaksudkan untuk menerapkan asas akuntabilitas yakni agar tidak terjadi hubungan langsung antara petugas yang mengurus proses perizinan dengan pengguna layanan sehingga tidak terjadi proses penyuapan misalnya walaupun persyaratan kurang izin tetap diproses.

Transparansi mengenai biaya dalam pengurusan perizinan juga terlihat di Dinas ini, yakni seluruh pengurusan izin tidak dikenai Biaya, kecuali beberapa ijin, antara lain IMB dan Ijin Gangguan. Hal ini dapat dilihat dari maklumat pelayanan yang terpasang di ruangan pelayanan perizinan. Tentang besarnya retribusi, diatur dalam Perda dipublikasikan dalam maklumat yang ada di dekat pintu masuk ruang pelayanan. Pemungutan biaya retribusi untuk izin-izin tertentu juga diumumkan, termasuk juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi beserta Perda-perda Kota Yogyakarta yang mengaturnya. Di antaranya untuk proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peraturan perundang-undangan yang mengatur :

1. Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
2. Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
3. Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

4. Perwal No.5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
5. Perwal No.6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ini contoh diskripsi tentang pelaksanaan asas tranparansi dalam proses perizinan IMB yang juga dijelaskan subjek (orang yang dikenai) kewajiban untuk mengurus IMB, yakni setiap orang atau badan yang akan membangun bangunan baru, mengubah, memperluas mengurangi dan merawat bangunan gedung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Orang yang melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan untuk memperoleh IMB ada 2 syarat, yakni: syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat administrasi, antara lain::

- a. Mengisi secara lengkap formulir permohonan IMB, tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat
- b. Fotocopy KTP pemohon
- c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah
- d. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan IMB tidak dalam sengketa.

Waktu proses pengurusan IMB selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak didaftarnya permohonan IMB apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar. Besarnya biaya retribusi juga ditentukan di dalam maklumat pelayanan.

Analisis dari bukti hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan terlihat bahwa di Kantor Dinas tersebut telah tersedia fasilitas dan sarana-sarana bagi kelompok rentan dan defabel, adanya petugas-petugas pemandu layanan yang dengan ramah melayani pengguna layanan, layar sentuh untuk mendapatkan nomor antrian yang menunjukkan implemetasi dari asas keadilan, pembagian loket-loket pelayanan perizinan yang dibuat kelompok-kelompok untuk jenis perizinan tertentu yang memperlihatkan telah dilaksanakannya keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh layanan, loket pengaduan, loket pengambilan



izin yang sudah jadi dalam bentuk Surat Keputusan Izin, loket petugas penghubung, ruang tunggu yang cukup representatif dan nyaman yang berada di sekitar loket-loket pelayanan, ruangan khusus untuk ibu menyusui, Kantor Bank yang berada di Dinas Perizinan yang bisa diakses oleh pengguna layanan apabila mereka harus membayar biaya retribusi dan biaya pelayanan. Di samping itu juga terdapat maklumat-maklumat yang berisi tentang petunjuk pelayanan, proses-proses untuk memperoleh layanan perizinan, dan maklumat-maklumat lain yang memperlihatkan adanya fasilitas-fasilitas untuk memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan, beserta fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana lainnya yang menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kebijakan pelayanan publik dibidang perizinan investasi di Indonesia. Analisis telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta juga diperkuat dengan bukti-bukti yang berupa gambar-gambar/foto-foto yang telah dipaparkan dalam diskripsi hasil penelitian di muka yang memperlihatkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

#### **4. Implementasi Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Investasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman**

Penelitian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada layanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan dengan melihat apakah pelaksanaan layanan tersebut sudah mengindahkan asas-asas pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pelayanan Publik. Seperti halnya di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Di dalam penelitian ini dikaji apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas: **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan**

**perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan ketepatan, kemudahan serta keterjangkauan.**

Setelah diadakan kajian dan analisis dari data-data yang didapatkan dilapangan baik berdasarkan dokumentasi, wawancara, serta observasi dapat dikemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah dilaksanakan, namun demikian pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kabupaten Sleman, belum sebaik apa yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman belum menerapkan Pelayanan Perizinan Satu Pintu seperti di Kota Yogyakarta. Namun demikian berdasarkan keterangan dari pejabat di lingkungan BKPMD Propinsi DIY, Kabupaten Sleman pada tahun 2013 ini merupakan Kabupaten/Kota di DIY yang telah melakukan pelayanan perizinan nomor dua (2) terbaik di DIY setelah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan dari Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, pelaksanaan perizinan di Pemda Sleman walaupun telah mendapatkan predikat terbaik nomor dua (2) di DIY, namun masih jauh bila dibandingkan dengan pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Sleman belum menerapkan kebijakan perizinan PTSP (Pelayanan Perizinan Satu Pintu). Kantor Perizinan Kabupaten Sleman hanya bertindak sebagai *front office*, penyelesaian proses perizinan investasi masih ditangani oleh instansi-instansi yang terkait dengan perizinan investasi. Keterangan dari Kasi Perizinan Kabupaten Sleman tersebut memperkuat hasil analisis data yang berasal dari observasi para pengamat di lapangan, memang setelah dicermati dan dianalisis, pelaksanaan pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan pelaksanaan layanan perizinan investasi di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang berupa Pelayanan Satu Atap.

Setelah dilakukan analisis dari data penelitian di lapangan didapatkan dokumentasi tentang mekanisme alur pelayanan perizinan yang di pasang pada papan pengumuman, mekanisme pelayanan Izin Gangguan, dan mekanisme pelayanan pengaduan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi

pengguna layanan apabila mereka akan mengajukan perizinan investasi. Hal ini menunjukkan telah dilaksanakannya **asas keterbukaan; akuntabilitas, kepentingan umum**. Sebagai contoh dalam pengurusan Izin Lokasi yang dituangkan dalam Perda Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang IPPT dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/KEP.KDH/A/2003 tentang Juklak Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 bahwa **persyaratan untuk pengajuan permohonan Izin Lokasi**, yaitu:

- a. Foto copy KTP pemilik sertipikat yang masih berlaku;
- b. Foto copy NPWP;
- c. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Salinan surat persetujuan penambahan modal dari Presiden/BKPN/BKPMDB bagi perusahaan PMA/PMDN;
- e. Uraian proyek yang akan dibangun (proposal);
- f. Rencana Tata Bangunan Sementara;
- g. Foto Copy bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau yang akan digunakan/dimohonkan izin;
- h. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah;
- i. Foto copy SPPT dan tanda lunas PBB tahun terakhir;
- j. Notulen rapat pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh Dukuh, Lurah Desa dan Camat dengan disertai daftar hadir peserta sosialisasi (setelah rapat koordinasi dilaksanakan);
- k. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang penyediaan fasilitas makam (khusus rencana pembangunan perumahan);
- l. Gambar site tanah (apabila tanah yang dimohonkan lebih dari 1 bidang tanah;
- m. Denah lokasi tanah yang dimohon
- n. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,- dan foto copy KTP penerima kuasa (apabila diurus orang lain).

Di Kabupaten Sleman juga diedarkan angket/kuesioner dan mengadakan wawancara dengan para pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti halnya pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan pada responden di Kota Yogyakarta (pengguna layanan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta) yakni terkait dengan bagaimana para petugas di dalam melayani pemohon; apakah pemohon sudah mendapatkan keadilan dalam pelayanan termasuk; adakah diskriminasi dalam pelayanan; apakah petugas pelayanan sudah melakukan tugasnya secara profesional, hormat, ramah dan sopan; apakah prosedur perizinan diumumkan secara jelas dan transparan termasuk untuk biaya-biaya yang diperlukan; apakah prosedur yang dimaklumkan mudah untuk difahami; apakah persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan; adakah fasilitas-fasilitas dan sarana khusus bagi kelompok rentan misalnya untuk orang tua dan defabel; apakah besarnya biaya yang diperlukan sebanding dengan hasil yang diperoleh; adakah kesesuaian waktu dengan selesainya pengurusan perizinan; bagaimanakah kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan; bagaimanakah kecepatan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan; bagaimanakah keamanan lingkungan dalam pengurusan perizinan; apakah sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi, teratur sehingga memberikan rasa nyaman.

Jawaban dari para pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman mengenai sudah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik bervariasi, menggambarkan apa yang mereka peroleh dari layanan perizinan di Kabupaten Sleman. Apa yang dikemukakan para pengguna layanan perizinan di Kabupaten Sleman memang senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman, bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman masih dilakukan oleh instansi terkait sehingga terkadang memerlukan waktu yang lama. Apalagi jika persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan belum lengkap bisa menambah waktu proses penyelesaian perizinan.

Kantor Pelayanan perizinan Kabupaten Sleman juga dibagikan kuesioner untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap kinerja aparat Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada IKM yang berisikan indikator-indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara atau birokrat yang termuat di dalam Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 dan juga menggunakan

standar Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009. Namun demikian berdasarkan keterangan dari Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman hasilnya memang tidak sebaik di Kota Yogyakarta. Indikator IKM yang disebarkan kepada pengguna layanan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
2. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya
3. **Kejelasan pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya)
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat
7. **Kecepatan Pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
9. **Kesopanan dan keramahan pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
12. **Kepastian Jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan
14. **Keamanan pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Walaupun nilai IKM di Kantor perizinan Kabupaten Sleman tidak setinggi IKM di Kota Yogyakarta, namun demikian tidak berarti bahwa Pemda Sleman belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasinya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pelayanan perizinan investasi. Memang berdasarkan keterangan dari pejabat di lingkungan Kantor KP3M Sleman, instansi yang mengurus koordinasi penanaman modal di Kabupaten Sleman di dalam pembuatan kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman belum bisa semua asas-asas dalam pelayanan publik diimplemetasikan dalam kebijakan-kebijakan penanaman modal terutama dalam layanan perizinan investasi.

Bukti dari telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman yakni terlihat dari hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan yakni beberapa asas telah dilaksanakan dalam pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Terlihat bahwa di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman telah memberikan sarana/fasilitas bagi kelompok rentan dan defabel, adanya petugas-petugas pemandu layanan yang dengan ramah melayani pengguna layanan, layar sentuh untuk mendapatkan nomor antrian yang menunjukkan implemetasi dari **asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kesamaan hak dan kewajiban**, loket pelayanan perizinan yang dibuat rapi dan nyaman yang memperlihatkan telah dilaksanakannya keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh layanan, ruang tunggu yang cukup representatif yang berada di depan loket pelayanan,

Di samping itu juga terdapat maklumat-maklumat yang berisi tentang petunjuk pelayanan, proses-proses untuk memperoleh layanan perizinan, dan maklumat-maklumat lain yang memperlihatkan adanya fasilitas-fasilitas untuk

memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan, beserta fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana lainnya yang menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan pengamatan dari tim peneliti jumlah para pengguna/pemohon layanan perizinan di Kabupaten Sleman setiap harinya lebih banyak bila dibandingkan dengan pengguna layanan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan dari Kasi Perizinan rata-rata tiap hari lebih kurang seratus (100) orang minimal 60 orang. Hal ini dapat dipahami karena jumlah jenis-jenis perizinan investasi yang ada di Kabupaten Sleman (77 jenis perizinan) dan semuanya diajukan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten sleman yang bertindak selaku *front office* lebih banyak bila dibandingkan dengan jenis perizinan yang ada di Kota Yogyakarta yang hanya 47 jenis perizinan. Kewenangan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada tahun 2013 hanya menangani 31 jenis perizinan dan sebagian besar termasuk jenis-jenis perizinan yang terkait dengan perizinan investasi. Hal ini bisa dilihat dari kajian tentang diskripsi jenis-jenis perizinan di Kota Yogyakarta dan jenis-jenis perizinan di Kabupaten Sleman yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dari laporan penelitian ini. Di samping itu wilayah Kabupaten Sleman juga lebih luas bila dibandingkan dengan wilayah Kota Yogyakarta, dan untuk jenis-jenis perizinan tertentu di Kota Yogyakarta cukup diselesaikan melalui Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

Gamabar-gambar yang telah dipaparkan dalam Diskripsi Hasil Penelitian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada layanan perizinan di Kabupaten Sleman, setelah dianalisis juga menunjukkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kabupaten Sleman walaupun belum sebaik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## BAB 6

### RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

#### 1. Penelitian Tahun Kedua :

- a. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun kedua merupakan penelitian lanjutan dari penelitian tahun pertama. Pada tahun pertama telah dilakukan tahapan eksplorasi terhadap wilayah sampel berupa 2 (dua) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang telah melaksanakan pelayanan publik administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi dengan kategori **baik** sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah diadakan penelitian dan kajian di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan predikat terbaik nomor 1 dan 2 di DIY dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam layanan perizinan investasi
- b. Untuk selanjutnya pada tahun kedua akan dieksplorasi wilayah untuk menentukan 2 (dua) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang mendapat predikat **kurang baik** dalam melaksanakan pelayanan perizinan investasi. Oleh karena itu, pada tahun kedua penelitian akan dilanjutkan untuk meneliti pemerintah kabupaten/kota yang termasuk kategori **kurang baik** dalam melaksanakan pelayanan perijinan investasinya.
- c. Langkah awal yang akan dilakukan tim peneliti adalah dengan melakukan pengkajian terhadap kesesuaian berbagai kebijakan pemkab/pemkot wilayah sampel kategori **kurang baik** di bidang pelayanan publik dengan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan pusat lainnya seperti yang telah dilakukan pada tahun pertama penelitian. di samping itu juga akan diteliti implementasi kebijakan yang telah dikaji tersebut dengan melihat pelaksanaan proses layanan perizinan investasi di wilayah sampel penelitian sekaligus juga akan digali kendala-kendala yang dihadapi oleh pemkab/pemkot yang menjadi sampel dengan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya hasil sementara penelitian tahun kedua akan ditindaklanjuti dengan uji publik dalam kegiatan *FGD*.



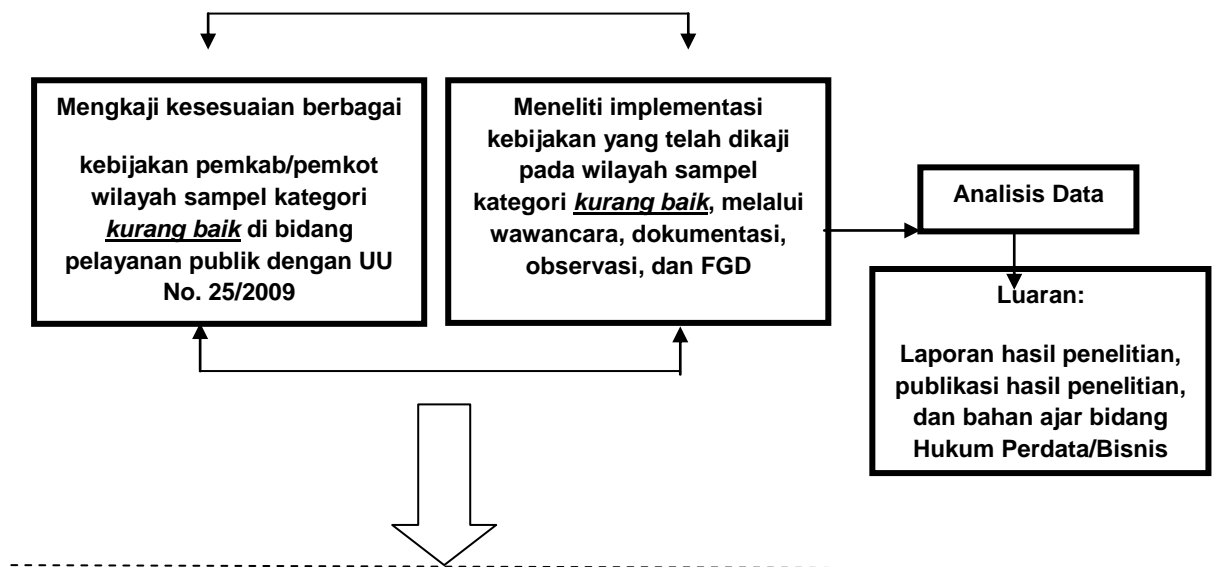
- d. Setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian tahun kedua terkumpul, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data seperti yang telah dilakukan pada penelitian tahun pertama.
- e. Langkah terakhir pada penelitian tahun kedua adalah menyusun laporan hasil penelitian, menyusun artikel untuk di publikasikan ke jurnal nasional/internasional, serta menyusun bahan ajar bidang Hukum Perdata/Hukum Bisnis. Beberapa produk tersebut merupakan luaran dalam penelitian tahun kedua.

## **2. Penelitian Tahun Ketiga:**

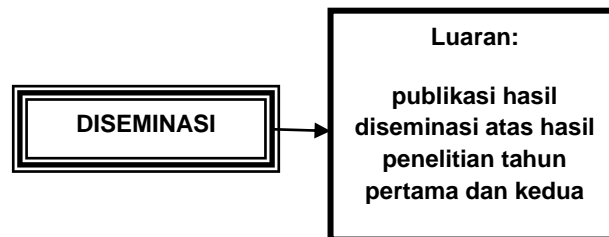
- a. Pada tahun ketiga, tim peneliti akan mengadakan diseminasi sebagai wujud penyebarluasan hasil penelitian tahun pertama dan tahun kedua kepada publik, terutama kepada pejabat/staff Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pelayanan publik. Diseminasi akan diselenggarakan dengan mengundang pejabat/staff Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang termasuk dalam kategori **kurang baik**, sehingga target khusus dari penelitian ini yaitu teridentifikasinya pelaksanaan asas-asas umum yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Propinsi DIY dapat tercapai dan sekaligus dapat dijadikan **rujukan model** dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi perijinan investasi bagi Daerah Kabupaten/Kota lain di Propinsi DIY maupun di Indonesia.
- b. Sebagai luaran dari kegiatan pada tahun ketiga ini, tim peneliti akan menyusun artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.

Berikut ini adalah bagan alir rencana tahapan penelitian berikutnya, yakni tahapan tahun kedua dan tahun ketiga penelitian.

### ***Tahun Kedua***



### ***Tahun Ketiga***



Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh pada tahun kedua yakni:

- Penentuan lokasi dan sampel penelitian dengan mencari informasi dan menetapkan 2 (dua) Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang pelaksanaan pelayanan publik bidang perizinan investasi belum baik untuk dikaji dan diteliti hal-hal yang menyebabkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik bidang perizinan investasi di wilayahnya.
- Setelah didapatkan data dilapangan mengenai dua (2) Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat kurang/belum baik dalam implementasi asas-asas umum pemerintaha yang baik akan dilacak instansi-instansi yang terkait dengan implementasi kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi di dua Kabupaten tersebut. Untuk selanjutnya di dua wilayah tersebut akan dikaji berbagai kebijakan yang terkait dengan

perizinan investasi dan pelaksanaan kebijakan layanan perizinan investasinya baik melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.

**Adapun langkah-langkah kegiatan penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut:**

- a. Mengkaji berbagai kebijakan pelayanan di bidang pelayanan administrasi penanaman modal khususnya perizinan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda Provinsi DIY, serta Kebijakan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah terpilih sebagai wilayah sampel penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan maupun berupa keputusan-keputusan;
- b. Mengkaji dan meneliti implementasi kebijakan perizinan investasi di masing-masing daerah yang menjadi sampel penelitian melalui wawancara dengan subjek penelitian, dokumentasi hal-hal yang terkait dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di wilayah sampel penelitian dan observasi pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelayanan perizinan investasi di kabupaten di kabupaten yang menjadi wilayah sampel penelitian dengan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan investasi.
- c. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkaya analisis dan hasil sementara atau *progress* hasil penelitian;
- d. Penyusunan hasil akhir penelitian, bahan Hukum Perdata/ Hukum Bisnis serta pengiriman artikel ke jurnal nasional atau internasional sebagai luaran tahun pertama dan tahun ke dua dari penelitian ini;

**Teknik pengumpulan data yang direncanakan pada penelitian tahun kedua, yaitu:**

- a. Wawancara akan dilakukan dengan subjek penelitian dengan pedoman wawancara tidak terstruktur yang garis besarnya telah disiapkan sebelumnya dengan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi wilayah sampel penelitian;
- b. Wawancara akan dilakukan juga dengan warga masyarakat pengguna layanan di wilayah sampel penelitian dengan cara mengedarkan kuesioner/wawancara terstruktur dengan angket tertutup;

- c. Dokumentasi akan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum terkait dengan pelayanan perizinan, yang berupa peraturan-perundangan-undangan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik bidang administrasi penanaman modal di wilayah sampel penelitian;
- d. Dokumentasi tentang pelaksanaan pelayanan publik di lapangan termasuk pengambilan foto-foto kegiatan pelayanan publik di instansi-instansi pelayanan publik di wilayah yang telah terpilih sebagai sampel penelitian dan gambar lokasi penelitian. Juga dokumentasi tentang pamflet-pamflet, brosur-brosur yang terkait dengan kegiatan pelayanan perizinan sehingga didapatkan deskripsi tentang implementasi asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi.
- e. Observasi tentang pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di instansi yang mengurus proses perizinan investasi di wilayah penelitian.
- f. Melaksanakan FGD untuk mempertajam analisis hasil penelitian dan laporan penelitian sementara

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melihat paparan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman merupakan bagian dari wilayah DIY yang pada tahun 2012 mendapatkan peringkat nomor satu (1) dan dua (2) dalam pelaksanaan pelayanan publik perizinan investasi;
2. Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapatkan predikat terbaik dalam layanan perizinan investasi terutama kemudahan-kemudahan dalam mendirikan usaha dengan indikator prosedur perizinan, waktu pengurusan perizinan, dan biaya bagi pengurusan perizinan;
3. Proses pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, namun demikian masih ada beberapa jenis perizinan investasi yang ditangani oleh instansi terkait;
4. Beberapa produk hukum Kota Yogyakarta yang dikaji menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah menunjukkan secara eksplisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian masih ada beberapa produk hukum lainnya yang dikaji baik yang berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta maupun Peraturan Walikota Yogyakarta baru menunjukkan secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Masih ada beberapa hambatan dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik bidang perizinan investasi di Kota Yogyakarta;
7. Di Kabupaten Sleman pelayanan perizinan investasi dilakukan dengan menggunakan sistem pelayanan perizinan satu atap oleh Kantor Pelayanan

Perizinan Kabupaten Sleman, di mana instansi ini hanya bertindak selaku front office bagi pelaksanaan pelayanan perizinan sedangkan proses perizinan investasi masih dilakukan oleh instansi terkait;

8. Beberapa produk hukum Kabupaten Sleman yang dikaji baru mengimplementasikan asas-asas umum secara implisit, dan belum tampak implementasi asas-asas umum secara eksplisit terhadap produk-produk hukum yang dikaji baik yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati, maupun SK Bupati;
9. Pelaksanaan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman sudah menunjukkan implementasi terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, walaupun di dalam pelaksanaan asas-asas tersebut tidak sebaik apa yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta;
10. Masih ada beberapa hambatan dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik bidang perizinan investasi di Kabupaten Sleman, terutama karena pelayanan perizinan masih menggunakan sistem pelayanan satu atap sehingga dirasakan bahwa prosedur penyelesaian perizinan masih memerlukan waktu yang lama dan biaya-biaya yang dikeluarkan masih cukup besar bila dibandingkan dengan Kota Yogyakarta.

## **B. SARAN/REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan-temuan lapangan dalam penelitian yang berjudul “Studi Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi di DIY”, maka dikemukakan saran maupun rekomendasi untuk beberapa pihak:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan di dalam pembuatan produk-produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota, dan produk-produk hukum daerah lainnya pada masa-masa yang akan datang seyogyanya mencantumkan secara eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat setelah diadakan penelitian dan kajian terhadap beberapa produk hukum yang diteliti belum semuanya mencantumkan secara eksplisit asas-asas umum

pemerintahan yang baik terutama produk hukum yang berkaitan dengan layanan perizinan investasi, walaupun Yogyakarta sudah mendapatkan predikat terbaik di Indonesia.

2. Pihak Kabupaten Sleman, diharapkan dalam pembuatan hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, dan produk-produk hukum daerah lainnya pada masa-masa yang akan datang mencantumkan secara eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam produk-produk hukum daerah, mengingat dari hasil kajian produk-produk hukum daerah yang diteliti di Kabupaten Sleman belum ada yang mencantumkan secara eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bagi Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia yang belum melaksanakan layanan publik terutama layanan perizinan investasi dengan baik, pelaksanaan pelayanan di Kota Yogyakarta dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam produk-produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang sudah **dicantumkan secara eksplisit** bisa dijadikan acuan dan rujukan untuk dilaksanakan sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi di Indonesia;
4. Penelitian ini baru sebatas mengkaji dari sisi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan publik perizinan investasi, masih perlu diteliti faktor-faktor atau pengaruh-pengaruh dari sisi sumber daya manusia pelaku implementasi/implementator kebijakan, watak dan karakterisitik implementator dan faktor-faktor pendukung lainnya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat keberhasilan suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh implementator di lapangan. Di samping itu juga faktor reward dan punish juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan, namun demikian dalam penelitian ini karena keterbatasan-keterbatasan yang ada faktor-faktor tersebut belum diteliti.
5. Perlu diteliti implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum kebijakan layanan publik perizinan investasi pada Kabupaten/Kota di Indonesia, baik yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, surat keputusan bupati/walikota, maupun produk-produk hukum daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida Ratnawati & Niken Arianti. 2006. *Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), tanggal akses 23 April 2011.
- Anonim. 2008. *Seminar Hasil Kajian Model Kelembagaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Bidang Air Bersih, Kebersihan dan Ruang Publik)*. Diakses dari internet [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), tanggal akses 21 April 2011.
- Anonim. Hasil Penelitian Pelayanan Publik Di Era Desentralisasi. Bappenas. Diakses dari [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), tanggal akses a Januari 2012.
- Eny Kusdarini dkk. 2011. Laporan Penelitian: Identifikasi Gugatan Pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. FIS UNY.
- Marbun. 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Moh Jasin dkk. 2006. *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sebagai Wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), tanggal akses 19 April 2011.
- Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.
- Harian Kompas 25 Februari 2012.
- ----- 2012. *Buku Panduan Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*. Penerbit: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- \_\_\_\_\_ 2012. *Buku Informasi Penanaman Modal Jogja*. Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM DIY.
- \_\_\_\_\_ 2012. *Laporan Penelitian Doing Business di Indonesia*. Publikasi Bersama Bank Dunia dan International Finance Corporation.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.



- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat izin Usaha jasa Konstruksi.
- Perda Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.
- Perda Kota Yogyakarta Nomo 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Perda Nomor Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB.
- Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB;

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1.Instrumen Penelitian**

**Studi Implementasi Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik dalam  
Kebijakan Pelayanan Publik Perijinan Investasi di DIY**



**PENELITI:**

**Eny Kusdarini, SH, M.Hum  
Setiati Widiastuti, SH, M. Hum  
Candra Dewwi Puspitasari, SH. LL.M**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2013**

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **& Rambu-rambu Diskripsi Kerja Peneliti**

#### **1. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dan pembantu peneliti (pencarian awal di BKPMD DIY)**

- a. Menginventarisir berbagai kebijakan pelayanan bidang administrasi penanaman modal khususnya perijinan investasi, baik yang berupa produk peraturan perundang-undangan dari pusat maupun dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu juga produk-produk kebijakan yang berupa keputusan-keputusan pemerintah pusat maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah daerah di Propinsi DIY terkait dengan kebijakan pelayanan publik di bidang perijinan investasi. Hal ini dipakai untuk melihat apakah dalam kebijakan tersebut sudah memuat ketentuan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau belum
- b. Menginventarisir dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di bidang perijinan investasi termasuk maklumat pelayanan, pedoman pelayanan, dan lain sebagainya.
- c. Mengambil gambar/foto-foto kegiatan pelayanan investasi, situasi keadaan ruang pelayanan, dan lain sebagainya setelah diadakan observasi

#### **2. Wawancara dengan pejabat dilakukan oleh peneliti, dengan masyarakat dilakukan oleh peneliti dengan pembantu peneliti**

- a. Membuat pedoman wawancara untuk para pejabat yang terlibat dalam kebijakan pelayanan publik bidang perijinan investasi untuk melihat bagaimanakah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik bidang perijinan investasi
- b. Membuat pedoman wawancara untuk masyarakat pengguna jasa pelayanan bidang perijinan investasi
- c. Wawancara dengan masyarakat (untuk setiap kabupaten/kota) kurang lebih 20 responden/subjek penelitian atau untuk semuanya kurang lebih 40 responden.

#### **3. Observasi oleh peneliti dan pembantu peneliti**

Melihat pelaksanaan/implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kegiatan pelayanan perijinan investasi

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Untuk Para Pejabat di lingkungan BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) DIY dan Kabupaten/Kota di DIY yang berada di lingkup instansi pelayanan publik bidang perijinan investasi**

1. Jenis-jenis perijinan investasi apa sajakah yang harus dicari oleh warga yang akan mendirikan suatu usaha di wilayah bapak/ibu/saudara?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik di bidang perijinan investasi?
3. Apakah pelayanan perijinan investasi di wilayah bapak/ibu/saudara sudah mengindahkan dan mengimplementasikan asas-asas dalam pelayanan publik sesuai dengan UU Pelayanan Publik?
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan layanan publik di bidang perijinan investasi?
5. Peraturan perundang-undang tentang apa sajakah yang telah memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama yang terkait dengan bidang perijinan investasi?
6. Asas-asas umum pemerintahan yang baik apa sajakah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perijinan investasi tersebut?
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik?
8. Apakah instansi bapak/ibu saudara terlibat di dalam pembuatan kebijakan perijinan investasi untuk cakupan wilayah Kabupaten/Kota di mana bapak /ibu/saudara bertugas?
9. Apakah dalam kebijakan tersebut sudah memasukkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan dalam UU Pelayanan Publik?

10. Bagaimanakah pembentukan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut diimplementasikan dalam kebijakan perijinan investasi (misalnya penjelasan tentang alur proses perijinan investasi, maklumat/pengumuman-pengumuman yang terkait dengan proses administrasi penanaman modal termasuk perijinan investasi
11. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan yang memuat asas-asas tersebut di lapangan?
12. Apa sajakah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penanaman modal di DIY termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di kabupaten/kota di DIY?
13. Adakah hambatan-hambatan dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang tertuang dalam UU Pelayanan Publik di wilayah kerja Bapak/Ibu/Saudara?
14. Bagaimana cara instansi (termasuk instansi lain yang terkait) dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
15. Efektifkah cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam wilayah kerja Bapak/Ibu/saudara?

**KUSIONER UNTUK MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN DI  
BIDANG PERIJINAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA DI DIY**

**Peneliti Dosen FIS UNY:**

**Eny Kusdarini, SH, M, Hum,  
Setiati Widiastuti, SH, M. Hum,  
Candra Dewi P, SH. LLM**

**Pengantar:**

Bapak/Ibu/Saudara pengguna layanan perizinan investasi mohon bantuan pengisian kusioner dalam rangka penelitian yang kami lakukan dengan judul “Studi Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi di DIY pada kolom yang tersedia. Kerahasiaan pengisian kusioner akan dijaga, sehingga mohon diisi dengan benar dan seobjektif mungkin. Penelitian ini kami lakukan untuk saran-asas perbaikan layanan perizinan investasi di DIY.

Cara pengisian dengan menuliskan nama Bapak/Ibu/Saudara beserta alamat pada kolom yang telah disediakan. Di samping itu juga diharapkan anda mengisi pertanyaan dengan cara melingkari alternatif jawaban yang tersedia atau mengisi alternatif lain sesuai keadaan yang sebenarnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kusioner ini kami mengucapkan terima kasih

**Tim Peneliti  
Eny Kusdarini dkk**



**No. Responden:**

**Nama Bapak/Ibu/Saudara: .....**

**Alamat Bapak/Ibu/Saudara: .....**

**Jenis Ijin yang dimohon:.**

1.....

2.....

3.....

dst

1. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimanakah pelayanan yang dilakukan oleh petugas dalam melayani pengurusan perijinan investasi?

Jawab:

- a. Sangat baik
- b. Cukup baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. ....

2. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara bagaimana keadilan dalam mendapatkan pelayanan dari para petugas?, (misalnya: pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani);

Jawab:

- a. Sangat adil
- b. Cukup adil
- c. Kurang adil
- d. Tidak adil
- e. ....

3. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah para petugas pelayanan perijinan investasi sudah memperhatikan asas kepentingan umum dalam arti mengedepankan kepentingan pengguna layanan dibanding dengan kepentingan sendiri?
  - a. Sangat mengindahkan kepentingan umum
  - b. Cukup mengindahkan kepentingan umum
  - c. Kurang mengindahkan kepentingan umum
  - d. Tidak mengindahkan kepentingan umum
  - e. ....
4. Apakah para petugas dalam melakukan pelayanan sudah melaksanakannya secara profesional?
  - a. Sangat profesional
  - b. Cukup profesional
  - c. Kurang profesional
  - d. Tidak profesional
  - e. ....
5. Apakah para petugas dalam melayani bapak/ibi/saudara mengurus perijinan melakukannya dengan hormat:
  - a. Sangat hormat
  - b. Cukup hormat
  - c. Kurang hormat
  - d. Tidak hormat
  - e. ....
6. Apakah para petugas dalam melayani bapak/ibi/saudara mengurus perijinan melakukannya dengan santun?
  - a. Sangat santun
  - b. Cukup santun
  - c. Kurang santun

d. Tidak santun

e. ....

7. Apakah para petugas dalam melayani bapak/ibi/saudara mengurus perijinan melakukannya ramah?

a. Sangat ramah

b. Cukup ramah

c. Kurang ramah

d. Tidak ramah

e. ....

8. Apakah prosedur perijinan diumumkan dengan jelas dan transparan (misalnya dipasang pada papan pengumuman atau maklumat pelayanan)?

a. Sangat jelas dan transparan

b. Cukup jelas dan transparan

c. Kurang jelas dan transparan

d. Tidak jelas dan transparan

e. ....

9. Apakah fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana fisik di instansi ini sudah mengindahkan perlakuan khusus bagi defabel (orang cacat fisik) golongan usia tua dan kelompok rentan lainnya?

a. Sangat mengindahkan kelompok rentan

b. Cukup mengindahkan kelompok rentan

c. Kurang mengindahkan kelompok rentan

d. Tidak mengindahkan kelompok rentan

e. ....

10. Apakah biaya pengurusan ijin investasi yang bapak/ibu/saudara bayarkan diberitahukan secara transparan. Dalam arti tarif-tarif biaya pelayanan sudah diumumkan dan bapak/ibu/saudara membayar sesuai dengan tarif yang diumumkan?
- a. Biaya yang dibayar diumumkan secara transparan
  - b. Biaya tidak diumumkan secara transparan
  - c. ....
11. Menurut bapak/ibu/saudara apakah besarnya biaya pengurusan perijinan sebanding dengan hasil perijinan usaha yang bapak/ibu/saudara urus?
- a. Sangat sebanding
  - b. Cukup sebanding
  - c. Kurang sebanding
  - d. Tidak sebanding
  - e. ....
12. Menurut bapak/ibu/saudara dalam pengurusan ijin investasi ini ada kesesuaian waktu yang telah diumumkan?
- a. Ada kesesuaian waktu
  - b. Tidak ada kesesuaian waktu
  - c. ....
13. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah prosedur pelayanan di dalam perolehan perijinan investasi cukup mudah untuk dipahami para pengguna layanan?
- a. Sangat mudah untuk dipahami
  - b. Cukup mudah untuk dipahami
  - c. Kurang mudah untuk dipahami (berbelit-belit)
  - d. Tidak mudah untuk dipahami (sangat berbelit-belit)

e. ....

14. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah prosedur pelayanan di dalam perolehan perijinan investasi cukup sederhana?

- a. Sangat sederhana
- b. Cukup sederhana
- c. Kurang sederhana (cukup berbelit-belit)
- d. Tidak mudah sederhana (sangat berbelit-belit)

e. ....

15. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana kedisiplinan petugas pelayanan dalam melayani para pengguna jasa?, (seperti: kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku)?

- a. Sangat disiplin
- b. Cukup disiplin
- c. Kurang disiplin
- d. Tidak disiplin

e. ....

16. Apakah maklumat/pengumuman terkait dengan proses alur pelayanan perijinan sudah cukup jelas bagi para pengguna jasa layanan?

- a. Sangat jelas
- b. Cukup jelas
- c. Kurang jelas
- d. Tidak jelas

e. ....

17. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara dalam hal kewajaran biaya pelayanan, (seperti: keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan)?

- a. Sangat terjangkau
- b. Cukup terjangkau
- c. Kurang terjangkau
- d. Tidak terjangkau

- e. ....
18. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana kecepatan pelayanan yang dilakukan oleh para petugas?, (dari sisi target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan)?
- a. Sangat cepat
  - b. Cukup cepat
  - c. Kurang cepat
  - d. Tidak cepat
  - e. ....
19. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana keamanan pelayanan, apakah sudah cukup terjamin dari sisi keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga pengguna layanan merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan?
- a. Sangat terjamin
  - b. Cukup terjamin
  - c. Kurang terjamin
  - d. Tidak terjamin
  - e. ....
20. Bagaimana kesopanan dan keramahan dari para petugas dalam melayani bapak/ibu/saudara?, ( seperti: sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta menghargai dan menghormati pelanggan):
- a. Sangat sopan
  - b. Cukup sopan;
  - c. Kurang sopan
  - d. Tidak sopan
  - e. ....
21. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana kenyamanan lingkungan, apakah kondisi sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan?
- a. Sangat nyaman
  - b. Cukup nyaman
  - c. Kurang nyaman

- d. Tidak nyaman
  - e. ....
22. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sudah sesuai dengan jenis pelayanannya?
- a. Sangat sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Kurang sesuai
  - d. Tidak sesuai
  - e. ....
23. Menurut Bapak/ibu/saudara, apakah ada diskriminasi dalam pelayanan publik yang bapak/ibu/saudara rasakan selama anda mengurus perijinan investasi?
- a. Ada diskriminasi
  - b. Tidak ada diskriminasi
  - c. ....
24. Bagaimana kepastian jadwal pelayanan? Apakah pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan:
- a. Sangat sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Kurang sesuai
  - d. Tidak sesuai
  - e. ....
25. Menurut Bapak/ibu/saudara bagaimanakah kepastian biaya pelayanan, apakah sudah sesuai antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?
- a. Sangat sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Kurang sesuai
  - d. Tidak sesuai
  - e. ....

**Terima Kasih**

## CHEK LIS LEMBAR OBSERVASI UTK PETUGAS OBSERVASI

### Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Perijinan Investasi (yang dianggap baik dalam pelayanan Publik)

Kabupaten/Kota.....

No	Asas	Pelaksanaan			
		Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik
1	Kepentingan umum				
2	Kepastian hukum				
3	Kesamaan hak				
4	Keseimbangan hak dan kewajiban				
5	Keprofesionalan				
6	Partisipatif				
7	Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif				
8	Keterbukaan				
9	Akuntabilitas				
10	Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan				
11	Ketepatan waktu				
12	Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan				

**Catatan:** Mohon dicermati & diamati apakah dalam pelaksanaan pelayanan perijinan investasi para petugas sudah mengindahkan asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ketepatan waktu, asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Cermati juga maklumat pelayanan apakah sudah jelas, tarif, prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan. Amati juga lingkungan fisik apakah sudah mengindahkan kepentingan bagi defabel dan kelompok rentan. Berikan catatan-catatan pada lembar pengamatan anda.

(Tuliskan nama pengamat, tgl/bln pengamatan dan tanda tangan).

Yogyakarta,.....

Nama Pengamat: .....

ttd

.....

CATATAN-CATATAN DALAM PENGAMATAN/OBSERVASI :



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Lampiran 2 Personalia Penelitian dan Kualifikasi

### Ketua Tim:

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Eny Kusdarini, SH, M. Hum
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Pendidikan Terakhir	S2 Ilmu Hukum
4	Bidang Keahlian	<b>Hukum Administrasi Negara</b>
5	NIP	19600304198601 2 001
6	NIDN	0004036006
7	Tempat dan Tanggal Lahir	4 Maret 1960
8	Alamat Rumah	Krapyak Wetan 128 A Panggung Harjo Sewon Bantul
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	No Telp Rmh: 0274387099/HP: 08122726326
10	Alamat Kantor	Jurusan PKn & Hkum FIS UNY
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Alamat e-mail	<a href="mailto:Eny.kusdarini@yahoo.com">Eny.kusdarini@yahoo.com</a>
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 : 40 orang mahasiswa
14	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Filsafat Hukum 3. Politik Hukum 4. Ilmu Negara 5. Pancasila 6. Pendidikan Kewarganegaraan

### Anggota Peneliti I

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Eny Kusdarini, SH, M. Hum
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Pendidikan Terakhir	S2 Ilmu Hukum
4	Bidang Keahlian	<b>Hukum Perdata/Hukum Bisnis</b>
5	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Bisnis 3. Hukum adat 4. Teori Hukum dan Konstitusi

	5. Pendidikan Pancasila
--	-------------------------

#### **Anggota Peneliti II**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Candra Dewi Puspitasari, SH. LL.M
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Pendidikan Terakhir	S2 Ilmu Hukum
4	Bidang Keahlian	<b>Hukum Perdata/Hukum Pajak</b>
5	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Perdata/Dagang 2. Hukum Pajak <b>3. Pendidikan Pancasila</b>

### **Lampiran 3. Abstrak artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia**

#### **Implementasi Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di DIY**

Oleh:

Eny Kusdarini (Fakultas Ilmu Sosial UNY)  
Setiati Widiastuti (Fakultas Ilmu Sosial UNY)  
Candra Dewi Puspitasari (Fakultas Ilmu Sosial UNY)

Paper ini bertujuan untuk: 1) memberikan gambaran tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota DIY sehingga dapat dipakai sebagai rujukan model dalam tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia; 2) mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota DIY.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio-legal riset* dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota DIY. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek penelitian adalah pejabat/staff Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, pejabat di lingkungan badan Penanaman Modal DIY, dan masyarakat yang pernah atau sedang memperoleh

layanan publik perijinan investasi di kabupaten/kota DIY yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang mendapatkan predikat terbaik di DIY dalam pelaksanaan pelayanan publik telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pemberian perijinan investasi di wilayahnya.

**Kata Kunci:** Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik Perijinan Investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

#### **Lampiran 4. Abstrak artikel ilmiah dalam bahasa Inggris:**

**The Implementation of the General Principles of Good Governance  
on Public Service Investment Licensing Policy  
in Regencies / Municipalities of Yogyakarta Special Province (DIY), Indonesia**

By:

Eny Kusdarini  
Faculty of Social Sciences YSU

Setiati Widiastuti  
Faculty of Social Sciences YSU

Candra Dewi Puspitasari  
Faculty of Social Sciences YSU

#### **ABSTRACT**

This paper aims at: 1) providing an overview of the implementation of the general principles of good governance on public service investment licensing policy in regencies / municipalities of DIY; 2) identifying barriers and constraints in the implementation of the general principles of good government on public service investment licensing policy in regencies / municipalities of DIY.

The method used in this study is *a socio-legal research* with a qualitative approach. The collected data is in the form of primary legal materials- the law related to public service investment licensing policy- and secondary legal materials which include documents related to the implementation of the general principles of good governance on public service investment licensing policy in regencies/municipalities of DIY. The data collection was done by using interviews, documentation and observation. The subjects of the research were officials / staffs at regencies and municipalities which become the research samples, officials at the Board of Investment DIY, and people who utilize public services investment licensing in Yogyakarta.

The research findings show that Yogyakarta Municipality and Sleman regency rank first and second in DIY regarding the implementation of public services, especially investment licensing services and have applied general principles of good

governance in accordance with Article 4 Public Service Act in Indonesia regarding the process of granting investment licenses within the region. This paper will present the implementation of the general principles of good government in Yogyakarta and the obstacles encountered during the implementation of these principles.

**Key Words:** The implementation of the General Principles of Good Governance, Public Service of Investment Licensing, Regencies and municipalities in Indonesia

## **Lampiran 5. Naskah Lengkap artikel dalam Bahasa Inggris :**

### **The Implementation of the General Principles of Good Governance on Public Service Investment Licensing Policy in Regencies / Municipalities of Yogyakarta Special Province (DIY), Indonesia**

By:

Eny Kusdarini  
Faculty of Social Sciences YSU

Setiati Widiastuti  
Faculty of Social Sciences YSU

Candra Dewi Puspitasari  
Faculty of Social Sciences YSU

#### **ABSTRACT**

This paper aims at: 1) providing an overview of the implementation of the general principles of good governance on public service investment licensing policy in regencies / municipalities of DIY; 2) identifying barriers and constraints in the implementation of the general principles of good government on public service investment licensing policy in regencies / municipalities of DIY.

The method used in this study is *a socio-legal research* with a qualitative approach. The collected data is in the form of primary legal materials- the law related to public service investment licensing policy- and secondary legal materials which include documents related to the implementation of the general principles of good governance on public service investment licensing policy in regencies/municipalities of DIY. The data collection was done by using interviews, documentation and observation. The subjects of the research were officials / staffs at regencies and municipalities which become the research samples, officials at the Board of Investment DIY, and people who utilize public services investment licensing in Yogyakarta.

The research findings show that Yogyakarta Municipality and Sleman regency rank first and second in DIY regarding the implementation of public services, especially investment licensing services and have applied general principles of good governance in accordance with Article 4 Public Service Act in Indonesia regarding the process of granting investment licenses within the region. This paper will present the implementation of the general principles of good government in Yogyakarta and the obstacles encountered during the implementation of these principles.

**Key Words:** The implementation of the General Principles of Good Governance, Public Service of Investment Licensing, Regencies and municipalities in Indonesia

## INTRODUCTION

The following article describe the implementation of the general principles of good governance on Public Service Investment Licensing Policy performed by the Yogyakarta municipality which get best first rank regarding the licensing services in DIY Indonesia. This paper is divided into several parts namely, introduction, discussion, and conclusions. The introduction section describes the background of the problem and research objectives. The discussion section explains: 1) the policy of investment licensing services in Indonesia; 2) the description of licensing services in Yogyakarta; 3) the description of the implementation of good governance general principles regarding the investment licensing services in Yogyakarta. The last section of this paper presents the conclusions of the research that has been discussed in the previous section.

This study is conducted since there are a lot of problems regarding the public services in Indonesia such as public services tend not to have the responsibility, responsiveness, and not representative. Added to this, there are many services in the field of education, health, transportation, social facilities, and a range of services managed by the government does not satisfy the public. Even, the private sector services are much better. These symptoms have been explained by Norman Flynn (1990:38). According to him, public services which are hierarchically managed by the government tend to be over bureaucratic, bloated, wasteful, and under performing. (Anonim. Research findings on public services in the era of decentralization, Bappenas. Retrieved from [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), January 4, 2012). However, not all regions / areas in Indonesia obtain such a negative portrait.

However, there are some areas of which officials have implemented good governance supported by a good setting, for example Yogyakarta municipality which has achieved the best four in the world in 2012 regarding the licensing services. It can be seen from the research Report of *Doing Business* in Indonesia 2012 issued by Indonesian IFC Advisory Services and Global Indicators and Analysis Department of the World Bank Group in collaboration with the Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee (2012:2) which reported that the position of cities in Indonesia with the easiest to set up business processes is occupied by Yogyakarta. In terms of public service on licensing, Yogyakarta municipality and Sleman regency got the first and second rank respectively in 2012. The research was conducted in those two areas

to get a picture of the implementation of good governance general principles regarding licensing public services in some parts of Indonesia.

The objective of writing this paper is to describe the implementation of the general principles of good governance on Public Service Investment Licensing in Yogyakarta municipality which has implemented good services on the investment licensing in DIY, Indonesia. With regard to this, Yogyakarta municipality is a role model for District / other cities in order to create good and clean government in Indonesia. This is done since the services are part of the administrative services in investment. Also, Indonesia is one of the investment recipients of the investors. It requires a good licensing service in the field of investment with regard to the principles of good governance as set out in Article 4 of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services which cover the principles of: public interest, the rule of law, equal rights, and the right balance duty, professionalism, participation, equality of treatment / non-discrimination, transparency, accountability, facilities and special treatment for vulnerable groups, timeliness, and accuracy, convenience and affordability.

The research procedures include documenting the law related to the Public Service Investment Licensing Policy from the central government, Yogyakarta local government and Yogyakarta municipality. Then, the researchers conducted further interviews with the officials of the Cooperation and Capital Investment Board (BKPM) of Yogyakarta and Yogyakarta municipality. The interviews were also conducted with 20 people who utilize licensing investment services in Yogyakarta to get an overview of the implementation of the general principles of good governance as stipulated in Article 4 of Law on Public Services. The research activities also include an observation which aims at getting a complete picture of the implementation of licensing services at Licensing Office of Yogyakarta.

## **DISCUSSION**

### **a. Public Service Investment Licensing Policy in Indonesia**

Public Service Investment Licensing Policy in Indonesia refers to various laws and regulations, including the Law no. 25 of 2007 on Investment, hereinafter referred to as the Capital Investment Law, Presidential Decree No. 27 Year 2009 about One Stop Licensing Services, Administrative Reform Decree No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 concerning the General Guidelines for Formulating Public Satisfaction Index Services Unit Government Agencies and other relevant laws and regulations related to investment activity (capital investment) in Indonesia.

The capital investment, in this context, refers to any form of investment activities performed by both the domestic or foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. In reference to the Law Article 3 paragraph 1, The capital investment is conducted on the basis of the following principles: legal certainty, transparency, accountability, equality, and not distinguishing the country of origin, togetherness, efficiency equitable, sustainable, forward-thinking environment, independence and balance of progress and unity of the national economy.

In relation to the basic policy regarding the capital investment, the Investment Law Article 4 states that the government sets the basic:

- a. Encouraging the creation of national business climate which is conducive for investors to strengthen the competitiveness of the national economy, and
- b. Accelerating the improvement of capital investment.

To issue the basic policy of the capital investment, the government gives equal treatment to domestic and foreign investors by considering the national interest.

In relation to the licensing policy of investment in Indonesia, Article 25 paragraph (4) of Investment Law determines that the investment company which conducts business activities must obtain a license based on the regulation of the institution that has the authority unless provided by law. Article 25 paragraph (5) of the law states that the licenses to investors are obtained through one stop service. This one-stop license service is performed based on the Article 26 of the Investment Law which aims at assisting the investors in obtaining ease of service, fiscal facilities, and information regarding investments. These licensing services are performed by an authorized institution or institution in the field of investment that gets delegation or devolution of authority from the institution or institutions that have licensing and non-licensing authority at the central level or institution which has authority to issue licenses and non-licenses in the province, regencies / municipalities. According to the article 26 paragraph (2) of Investment Law, the procedures and the implementation of one stop service is regulated by Presidential Decree.

One stop licensing service on capital investment is regulated by Presidential Regulation No. 27 Year 2009 about the licensing service at one stop investment. In reference to the Article 1 paragraph 4 of the Decree of the President, one stop licensing service (OSS) is an activity of organizing a license and non-license which has received delegation or devolution of authority from the institution or institutions that have the authority of licensing and non-licensing in which the management process starts from the application until the publication of the document performed in a single place. Licensing which is intended in Presidential Regulation 27 of 2009 is any agreement to make an investment (capital investment) issued by the government and local governments which have the authority in accordance with the Law. Non licensing is any ease of service, fiscal facilities, and information regarding investments in accordance with the Law.

The Article 2 of the Presidential Decree No. 27 Year 2009 states that the implementation of one stop licensing service in the field of investment is based on the following basis: legal certainty, transparency, accountability, equal treatment and not distinguishing country of origin, and the efficiency of justice. The implementation of one stop licensing service in the field of investment which based on Article 3 of the President is aimed at developing investment with easy services, facilities, and information by accelerating service, simplifying service and reducing management fees of licensing and non-licensing. The scope of one stop licensing service in the field of investment includes service for all types of licensing and non- licensing in the field of capital investment which are required to perform investment activities. The measurement basis of one stop licensing service in the field of investment is stipulated in Article 5 of the presidential decree No. 27 year 2009. This measurement is seen from the implementation of one stop licensing service in the field of investment that should produce an excellent service measured by some indicators such as speed, accuracy, simplicity, transparency, and certainty of the law. The implementation of one stop licensing service in the field of investment should be supported by the availability of:

- a. human resources who are professional and have reliable competence;

- b. space, facilities and working infrastructure, and information media;
- c. working mechanism in the form guidelines for implementing one stop licensing service in the field of investment which are clear, easy to understand and accessible to investors;
- d. help desk for investors, and
- e. Electronic Information Systems and Licensing Services Investments (SPIPISE).

The article 8 of Presidential Regulation No. 27 of 2009 also regulates the governmental affairs in the field of investment under the authority of the central government which consists of:

- c. Implementation of the investment of which scope across the province;
- b. Governmental affairs in the field of investment, which include:
  - 7) An investment related to unrenewable natural resources at the level of a high risk of environmental damage;
  - 8) An investment in the industry which becomes a high priority on a national scale;
  - 9) An investment related to unifying and connecting the region or cross-provincial area;
  - 10) An investment related to the implementation of the strategy of defense and national security;
  - 11) Foreign investment and the use of foreign capital investment from governments of other countries, which is based on the agreement made by the Indonesian Government and other governments and
  - 12) Other investments which become the affairs of government regulated by law.

The assessment for the performance of the government officials in conducting investment licensing services in Indonesia refers to the Administrative Reform Decree No.25/KEP/M.PAN/2/2004 about the General Guidelines for Developing Public Satisfaction Index Services of Unit Government Institution. The decree sets out 14 indicators of organizational performance measurement in public services which are performed by the state or bureaucratic administration tools. Those indicators are:

- 15. Service procedures, that is, the simple stage of service provided to the community viewed from the aspects of simplicity service procedure;
- 16. Service requirements, that is, the technical and administrative requirements needed to fit with the type of service ;
- 17. The clarity of the staffs identity, that is, the existence and certainty of the staffs who provide services (names, titles and authority and responsibilities );
- 18. The discipline of the staff who give services, that is, the staff enthusiasm in providing the service especially the consistency of their working hours with the regulation.
- 19. Staffs responsibilities, that is, the clarity on their authority and responsibility in implementing and finishing service;
- 20. The ability of the staffs, that is, the expertise and skill of the staff in providing/completing services to society ;



21. The speed of service, that is, service time targets which suits with the time specified by the unit organizers of the service;
22. Fare service, that is, the implementation of the service which doesn't distinguish the status of the community being served ;
23. Politeness and friendliness of the staff, that is, the attitude and behavior of staff in providing service to the community in polite, friendly, and respectfull manner.
24. Appropriateness of the service charge, that is, the affordability of the charge as determined by the unit which organizes services ;
25. Certainty of the service charge, that is, the appropriateness between charge being paid and determined charge ;
26. Certainty of the service schedule, that is, the appropriateness between the service time and the scheduled time.;
27. The comfortable environment, that is, the condition of facilities and service infrastructure that is clean, neat, and well organized so that it is comfortable for the service recipient;
28. Service security, that is, the security assurance of the unit organizers or facilities used by the people so that they feel relaxed to get the service of such risks resulting from the implementation of the service .

The indicators of the organizational performance stipulated in the Ministerial Decree of Administrative Reform. No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 are still used to assess the performance of civil servants. This assessment is performed by the society including the service recipients on investment licensing. In Yogyakarta, the service recipients on licensing are requested to fill a questionnaire that assesses the performance of the staffs in giving licensing and complaints against the service. This is monthly evaluated and is followed up.

#### **b. The Description of the Licensing Services In Yogyakarta Municipality**

Yogyakarta municipality is one of the areas in DIY- one of the 33 provinces in the territory of the Republic of Indonesia and is located in the south central part of Java Island. Instead of Yogyakarta municipality, there are four (4) other regencies in this province, namely: Kulon Progo; Bantul; Gunung Kidul. Among those five areas, Yogyakarta municipality ranked first regarding the assessment on giving licensing services including investment licensing in DIY. Meanwhile, Sleman regency ranked second. The following describes some things related to the activities of investment licensing services, especially in Yogyakarta municipality.

Investment licensing service activities in Yogyakarta are implemented by the Office of Licensing. This office conducts one stop licensing service activities (PTSP) in Yogyakarta based on delegating / handing over the licensing authority from the Mayor of Yogyakarta regarding the implementation of licensing services. Authorities that are attached to the Licensing Office of Yogyakarta are as follows:

5. License signing authority on related institution that has been revoked through the regional law on Organizational Structure Formation and Administration of their respective offices and becomes the functions and duties of the Department of Licensing. In this case, the Department of Licensing acts as front office, in office, and back office.

6. The authority attached to the Department is related to licensing in that it deals with providing a license; rejecting license; revocating license; legalizing license; duplicating license; and supervising license.
7. Some licenses signed by the related institutions (Department of Health; Department of Revenue and Financial Management; Department of Industry, Trade, Cooperatives and Agriculture) become the deposit in the Department of Licensing. In this case, the licensing institution acts as a front office.
8. Part of the licensing authority is delegated to the district by considering the efficiency and effectiveness.

The type of licensing in Yogyakarta municipality consists of investment and non-investment licensing. Those types of licensing are based on the Regulation of Yogyakarta Mayor No.18 Year 2011 about the Implementation of Licensing in the Yogyakarta municipality. They include:

48. Building Permit
49. Disturbance Permit
50. Permits of Connecting Wastewater
51. Permits of Redirecting rain water Channels
52. Disturbance Permit (*Hinder Ordonantie/HO*)
53. Industrial Business License (IUI) and Signs list of industry
54. Trade Business License (*online registration*)
55. Trade Business License of alcoholic drink
56. Permits of special parking of Private Company
57. Permits of Non-Permanent Parking lot
58. Transportation business license
59. The ads license
60. Construction services Business Licence
61. Business license management of traditional markets
62. Shopping center business licenses
63. Modern store business licenses
64. Signs list of tourism business, which include:
  - a. Tourism Attractions;
  - b. Tourism Area;
  - c. Travel Transportation Services;
  - d. The tour services;
  - e. Food and drink services;
  - f. Accommodation facilitation;
  - g. Conducting Fun and Recreation activities;
  - h. Conducting Meeting, Incentive tour, Conference and Exhibition;
  - i. Tourism information services;
  - j. Tourism Consulting Services;
  - k. Tour guide services;
  - l. Tirta tourism; and
  - m. Solus per Aqua (SPA).
65. Groundwater Exploration Permit
66. Drilling permits and retrieval of underground water
67. Permits of work and the springs of water
68. Permits of Groundwater Drilling Business
69. Permits of Technician Groundwater Drilling
70. Permits of Cemetary

71. Permits of Health Personnel
72. Permits of Health Facilities
73. Permits of Beauty salon;
74. Permits of Formal Educational Institution Establishment
75. Permits of Non-Formal Educational Institution Establishment
76. Permits of Labour Provider services
77. Permits of Animal Slaughtering
78. Permits of Meat Selling
79. Permits of Meat Grinding
80. Permits of Meat Storage
81. Permits of Boarding House Business
82. Permits of Street Vendor Space
83. Permits of Research (online registration)
84. Permits of Field work Practice (online registration)
85. Permits of Real Work Practice
86. Permits of trees logging and garden displacement
87. Permits of the temporary storage waste B3;
88. Waste collection permits B3 at City level
89. Sign of warehouse list
90. Sign of the company registry (online registration)
91. Letter of franchise registration
92. Traditional healer check mark

In reference to the regulation of Yogyakarta Mayor article 6 paragraph 1 Number 18 year 2011, there are 34 licensing of which the implementation becomes the authority of Yogyakarta Licensing Office. In 2013, the licenses are simplified and integrated within a single service. Therefore, it becomes 31 different types and most of them are related to investment activities. Some licensing authorized by Mayor of Yogyakarta is delegated to district governments within the Yogyakarta municipality.

To produce a welfare society in Yogyakarta, Licensing Office performs licensing activities such as: licensing socialization, advice planning, licensing service, and licensing supervision. The state apparatus and officials at Licensing Office in Yogyakarta municipality implement their duties based on the standard operational procedures as stipulated in the decree of Yogyakarta Licensing Office Head No 42/KEP/DINZIN/2012 about the implementation of Licensing Standard Operating Procedure at Yogyakarta licensing office.

### **c. The Implementation of the General Principles of Good Governance on Public Service Investment Licensing at Yogyakarta Municipality**

The study about the implementation of the general principles of good governance on investment licensing services at Yogyakarta municipality is performed by analyzing the implementation of the general principles of good governance on investment licensing services at the licensing institution of Yogyakarta by seeing whether or not the implementation of the service follow the principles of public service as stated in article 4 of the Law of Public Service. These principles include: public interest, rule of law, equal rights, the balance of rights and obligations, professionalism, participation, equality of treatment/non-discrimination, transparency, accountability, facilities and special treatment for vulnerable groups, timeliness, the speed, easiness and affordability.

In reference to the data obtained from the documentation, interviews, and

observations, it can be concluded that the general principles of good governance as stipulated in Article 4 of the Public Service Act which consist of public interest; rule of law; equal rights; balance of rights and obligations; professionalism; participatory equality of treatment / non-discrimination; openness; accountability; facilities and treatment for vulnerable groups; timeliness, the speed, easiness and affordability are executed properly. This can be seen from the responses to questionnaires that were distributed on the 20 service recipients. When they were interviewed, they stated that the principles of public service has been implemented quite well, even some service recipients expressed that the principles were very well executed and there is only one service recipient who states that the implementation of the general principles of good governance in the public service is still not good. The questions addressed to the service recipients (the research respondents) related to the staffs who give service include: does the recipient already gets fare service? ; is there any discrimination in service? ; does the officer perform his job professionally, friendly and politely? ; are the licensing procedures explained in a clear and transparent manner including the charge needed? ; are the procedures easy to understand? ; do the service requirements suit with the types of services? ; is there any facilities for vulnerable groups such as older and disable people? ; does the costs suit with service given?; do the officers finish the licensing process on time?; how discipline are the officers in giving services?; how is the speed and ease in processing a licensing?; how is the security environment in licensing process?; are the service infrastructure clean, neat, orderly managed so that it provide a sense of comfort?.

The licensing services recipients state that the general principles of good governance have been implemented. This statement is supported by the statements of the officials at the Licensing Office within Yogyakarta municipality, that is, every two month in-house training related to the licensing service is held for the staffs. Also, it can be seen from the results of the Community Satisfaction Index measurement in Yogyakarta that are monthly analyzed and followed up by the Licensing Office of Yogyakarta municipality. This measurement show that an average final score up to June 2013 reveals: Building Permit gets ratings from the service recipients 80.33; Disturbance Permits 81.86; Trade Business permit 81.48; Signs list of industry 82.55; Signs list of tourism business 84.52; and other license types 84 and 54. Community Satisfaction Index is in the form of questionnaires which are distributed to the service recipients. When they have finished filling the questionnaires, they return the questionnaire to the staff right after they have completed their licensing process.

Community satisfaction index contains questions related to the licensing service they receive. The questions refer to the 14 indicators of organizational performance measurement in public services which are performed by the state or bureaucratic as stipulated in the Administrative Reform Minister Decree No. 25/KEP/M.PAN/2/2004. This include service procedures, service requirements, the clarity of the staffs identity, the discipline of the staff who give services, staffs responsibilities, the ability of the staffs, the speed of service, fare service, politeness and friendliness of the staff, appropriateness of the service charge, certainty of the service charge, certainty of the service schedule, the comfortable environment, service security.

Other evidences stating that the general principles of good governance in investment licensing services in Yogyakarta of have been implemented are shown

by the observations which reveal that Licensing Office has already provided facilities and means for vulnerable groups, the friendly drivers who give service to client, the touch screen machine to get a queue number that shows the implementation of basic fairness, the division of licensing service into several clusters based the types of licensing service which shows the assurance of the security and convenience in obtaining services, complaint space, a space for taking the licensing which has been designed in the form of permission Letter, space for liaison officer, representative and comfortable lounge area around licensing service space, a room for breastfeeding mother, a bank located around Licensing Office which are accessible for service recipients when they have to pay a retribution and service charge. Moreover, there is some information about service procedure, processes for obtaining licensing services, and other information that shows the availability of facilities to acquire convenience and clarity of the service, and facilities which show that the general principles of good governance has been implemented in Yogyakarta regarding the Public Service Investment Licensing Policy in Indonesia.

However, there are some obstacles in the implementation of the licensing services because there are several types of investment licensing activities that are handled by institutions outside of the Licensing Office. Those types of licensing include the trading licensing process which is handled by the Office of Trade and industrial investment licensing which is handled by the Department of Industry. In this case, Licensing Office will only act as a front office. Meanwhile, the licensing service is performed by the related institutions. With regard to this condition, the licensing process cannot be finished on time although there are no complaints addressed by the recipients.

Other obstacles, though not too influential to the licensing service activities, are lack of human resources who are professionals in giving licensing service especially in the field of investment licensing at Yogyakarta Licensing Office. These obstacles constraint the implementation of the general principles of good governance on Public Service Investment Licensing Policy in Yogyakarta.

## **CONCLUSION**

In reference to the explanation and discussion above, the conclusions are as follows:

1. The general principles of good governance as stipulated in Article 4 of the Law on Public Service which are regarded as general principles in implementing public service may include: the public interest; certainty of law, equality of rights; balance of rights and obligations; professionalism; equality treatment/ not discriminative; openness; accountability; facilities and treatment for vulnerable groups; timeliness, the speed, convenience and affordability. Those principles have been appropriately implemented in Yogyakarta.
2. Several obstacles encountered in the implementation of the general principles of good governance in the Licensing Office of Yogyakarta consist of: some licensing process cannot be finished on time because some licensing related to the investment activities are handled by the institutions outside of the Licensing Office; and there are limited professionals who understand the investment licensing service.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Anonymous . Public Services Research in the Era of Decentralization, Bappenas : [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id) , retrieved in January 4, 2012.
- Doing Business in Indonesia 2012 . Research report. The World Bank , the International Finance Corporation in collaboration with the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform , and the Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee.
- Law No. 25 Year 2007 on Investment
- Law No. 25 of 2009 on Public Service
- Presidential Regulation No. 27 Year 2009 on One Stop Licensing Service
- Decree of the Minister of State for Administrative Reform 25/KEP/M.PAN/2/2004 Number of Rough Guide to Developing Public Satisfaction Index Services Unit Government Agencies.
- Regulation No. 18 of Yogyakarta Mayor, 2011 on the Implementation of Licensing in Yogyakarta municipality.
- The decree of the Head of Licensing Yogyakarta No 42/KEP/DINZIN/2012 on Standard Operating Procedures in implementing the Licensing service in Yogyakarta Licensing inst